LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023



Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta

KATA PENGANTAR

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu SKPD di Jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai tugas mengelola Pertamanan, Pemakaman, Kehutanan dan Taman Margasatwa Ragunan di Kota Jakarta. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memiliki cakupan tugas pokok dan fungsi yang cukup luas, yakni Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Taman, Jalur Hijau, Hutan Kota, Kebun Bibit, Taman Margasatwa Ragunan serta Pelayanan Pertamanan, Pemakaman dan Kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta senantiasa melakukan upaya terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun harus diakui bahwa penyelenggaraan tugas fungsi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya mencapai kinerja yang diharapkan.

Selama Tahun 2023, keseluruhan kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah dilaksanakan seoptimalnya dan akan diuraikan lebih mendetail dalam LKIP Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 yang memuat gambaran dan evaluasi capaian kinerja. Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dapat diterbitkan. Dengan telah berakhirnya Tahun 2023 berarti Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun pertama dikaitkan dengan implementasi Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta. Masih banyak tugas, tanggung jawab serta tantangan yang dihadapi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta kedepan, namun dengan dukungan sumberdaya aparatur di lingkungan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta serta kolaborasi dengan berbagai pihak terkait lainnya, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota bertekad untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

Akhir kata semoga laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif serta dapat memberi manfaat yang optimal serta dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta bagi peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Jakarta, Januari 2024
Kepala Dinas Pertamanan
dan Hutan Kota
Provinsi DKI Jakarta

Dr. Bayu Meghantara, S.IP., M.Si
NIP 197205201991011001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Seluruh program dan kegiatan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dijabarkan melalui tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengukur pencapaian kinerja yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan tersebut, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, pencapaian kinerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 diukur melalui 3 (tiga) kelompok sasaran yaitu Sasaran Strategis, Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional yang merupakan satu kesatuan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Tiap indikator akan dihitung pencapaiannya dan dijabarkan secara menyeluruh termasuk penyerapan anggarannya. Berikut pencapaian dari ketiga kelompok sasaran tersebut:

No	Kelompok Sasaran	Jumlah indikator	Tercapai	Tidak Tercapai
1	Sasaran Strategis	12	12	0
2	Sasaran Khusus	13	11	2
3	Sasaran Operasional	4	1	3
	Total	29	24	5

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota di tahun 2023 tercapai sebanyak 24 indikator dari 29 indikator yang ditargetkan (82,8%). Pada bab Akuntabilitas Kinerja diuraikan secara lebih lengkap atas capaian indikator kinerja baik yang tercapai sesuai target maupun yang tidak tercapai berikut faktor keberhasilan dan penghambat. Dari segi anggaran, di tahun 2023 ini pagu APBD Dinas Pertamanan dan Hutan Kota terserap sebesar 95,4%. Sisa anggaran yang tidak terserap merupakan efisiensi penggunaan anggaran.

Pencapaian target kinerja dan penyerapan anggaran di tahun 2023 telah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Adanya beberapa indikator kinerja yang tidak tercapai, tntunya akan menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota agar melakukan upaya perbaikan secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan dan pengawasan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki agar ke depannya semua target kinerja yang sudah diperjanjikan bisa tercapai lebih baik dari sebelumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 TUJUAN DAN MANFAAT 1
1.3 KEDUDUKAN DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA 2
1.4 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 2
1.5 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI 4
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 6
BAB II PERENCANAAN KINERJA 7
2.1 RENSTRA DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA 7
2.2 PERJANJIAN KINERJA 11
2.3 TUJUAN DAN SASARAN RPD 2023-2026 18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 20
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2023 20
3.2 CAPAIAN STRATEGIS KINERJA 27
3.3 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 53
3.4 ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA 56
3.5 INOVASI 56
3.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 58
BAB IV PENUTUP 64
4.1 KESIMPULAN 64
4.2 SARAN 64
LAMPIRAN 65
A. PERJANJIAN KINERJA 65
B. PENGHARGAAN DARI TINGKAT NASIONAL/INTERNASIONAL 76

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Target Tujuan Renstra Tahun 2023-2026 8
Tabel 2 Target Sasaran Renstra Tahun 2023-2026 9
Tabel 3 Indikator Kinerja Utama 2023-2026 10
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2023 12
Tabel 5 Pagu Anggaran Tahun 2023 17
Tabel 6 Tujuan dan Sasaran RPD dan Renstra 2023-2026 19
Tabel 7 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023 20
Tabel 8 Rekapitulasi Kinerja Organisasi Tahun 2023 27
Tabel 9 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2023 27
Tabel 10 Capaian Indeks Kualitas Lahan 29
Tabel 11 Sebaran Capaian Indeks Kualitas Lahan Berdasarkan Wilayah 30
Tabel 12 Perbandingan Capaian IKTL Dengan Target Nasional 32
Tabel 13 Capaian Indikator persentase Ruang Terbuka Hijau 33
Tabel 14 Daftar Aset dari Serah Terima Fasos Fasum Tahun 2023 33
Tabel 15 Faktor Pendorong dan Penghambat 41
Tabel 16 Capaian Indikator Persentase Penambahan 42
Tabel 17 Data Penanaman Mangrove Tahun 2023 45
Tabel 18 Capaian Indikator Persentase Wilayah kelurahan dengan Infrastruktur Hijau-Biru 48
Tabel 19 Daftar Lokasi Pembangunan/Penataan 48
Tabel 20 Daftar Kelurahan dengan Infrastruktur Hijau- Biru 48
Tabel 21 Capaian Rencana Aksi KSD 2023 51
Tabel 22 Realisasi Anggaran Tahun 2023 Per Program 54
Tabel 23 Realisasi Anggaran Tahun 2023 Per UKPD 54
Tabel 24 Efisensi Penggunaan Anggaran 2023 55
Tabel 25 Perhitungan Nilai Efisiensi Indikator Persentase Wilayah Kelurahan dengan Infrastruktur Hijau-Biru Terintegrasi 59
Tabel 26 Perhitungan Nilai Efisiensi Indikator Persentase penambahan Luas dan Kualitas Lahan RTH Hutan 61
Tabel 27 Data Sumber Daya Manusia Tahun 2023 62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota 4
Gambar 2 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota 2023 11
Gambar 3 Trend Capaian Nilai IKTL Provinsi DKI Jakarta 2020-2023 30
Gambar 4 Berita Acara Serah Terima Aset Fasos Fasum 40
Gambar 6 Pembangunan RTH Hutan 2023 44
Gambar 7 Bioswale di RTH Jalur Hijau 57
Gambar 8 Penanaman 1000 pohon oleh Bapak Pj Gubernur DKI Jakarta 58
Gambar 9 Sebaran ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan 63
Gambar 10 sebaran ASN Berdasarkan Golongan 63

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bagi instansi pemerintahan, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa yang sesuai dengan prinsip good governance. Penyusunannya mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah serta Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta adalah unsur pelaksana pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada sub urusan pertamanan dan pemakaman, memiliki tanggung jawab dalam menyusun LKIP dan melaporkan capaian terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja pembangunan setiap tahunnya.

Penyusunan LKIP Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang dijabarkan dalam Tujuan, dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Perencanaan, yaitu; Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Selain itu dokumen LKIP juga sebagai instrumen yang digunakan untuk mendapatkan umpan balik (*feedback*) dalam rangka perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

1.2 TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan dari pernyusunan LKIP Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tahun 2023 ini adalah untuk menyampaikan informasi capaian kinerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sesuai yang diperjanjikan selama tahun 2023, dengan membandingkan capaian kinerja Dinas terhadap rencana kinerja Dinas.

Manfaat penyusunan LKIP Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1) Aspek Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
   LKIP Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi atas penggunaan anggaran melalui pengukuran capaian kinerja dan evaluasi serta penjelasan yang memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja selama periode tahun 2023.
2) Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
   LKIP Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 merupakan sarana evaluasi pencapaian kinerja dan upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap kendala dan hambatan yang ditemukan dapat dirumuskan strategi pemecahannya sehingga capaian kinerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

Provinsi DKI Jakarta dapat ditingkatkan secara simultan dan berkesinambungan.

1.3 KEDUDUKAN DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dipimpin oleh Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota berada dibawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah. Kepala Dinas melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada sub urusan pertamanan dan pemakaman.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota ditetapkan melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada sub urusan pertamanan dan pemakaman. Sehingga Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memiliki peran strategis dan tanggungjawab atas terlaksananya pengelolaan pertamanan, pemakaman, jalur hijau dan kehutanan di Provinsi DKI Jakarta.

Sehubungan dengan hal itu maka tugas yang diemban oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan pelayanan pertamanan dan pemakaman. Tugas pokok ini dijabarkan dalam beberapa fungsi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, yaitu;

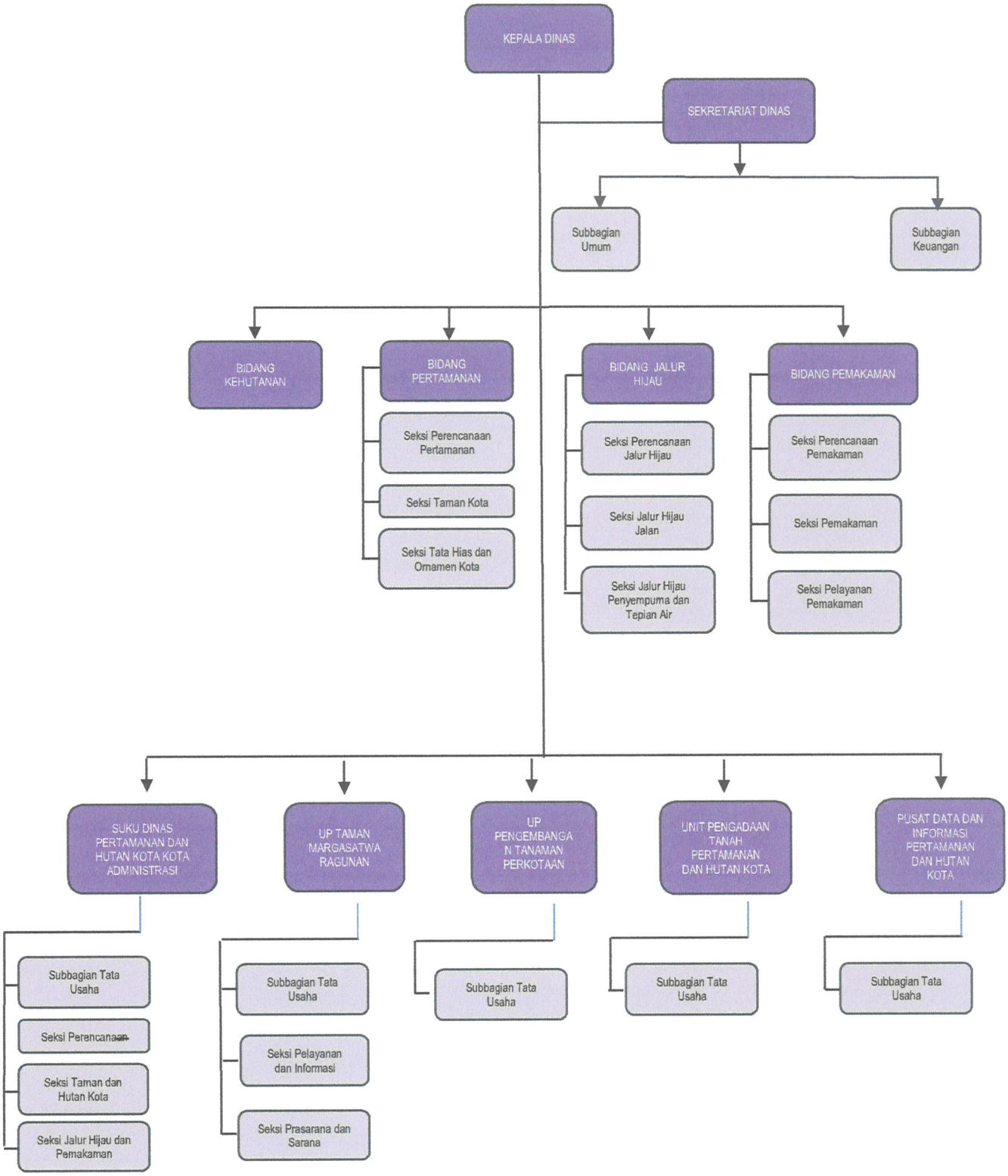
a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
c. Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
d. Pelaksanaan kebijakan proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
e. pelaksanaan pengelolaan pertamanan;
f. pelaksanaan pengelolaan jalur hijau;
g. pelaksanaan pengelolaan kehutanan;
h. pelaksanaan pengelolaan konservasi flora dan fauna;
i. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan pemakaman;
j. pengembangan peran serta masyarakat di bidang kehutanan, pertamanan, jalur hijau, dan pemakaman;
k. pengawasan dan pengendalian izin/non izin di bidang kehutanan, pertamanan, jalur hijau, dan pemakaman;
l. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;

m. pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang penamanan dan hutan kota;
n. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada sub urusan pertamanan dan pemakaman;
o. pengelolaan data, informasi, dan transformasi digital pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan danurusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada sub urusan pertamanan dan pemakaman; dan
p. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tersebut, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilengkapi dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Susunan organisasi struktural Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, terdiri atas:
a. Sekretariat Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, terdiri atas:
   1) Subbagian Umum; dan
   2) Subbagian Keuangan;
b. Bidang Kehutanan;
c. Bidang Pertamanan, terdiri atas:
   1) Seksi Perencanaan Pertamanan
   2) Seksi Taman Kota; dan
   3) Seksi Tata Hias dan Ornamen Kota;
d. Bidang Jalur Hijau, terdiri atas:
   1) Seksi Perencanaan Jalur Hijau;
   2) Seksi Jalur Hijau Jalan; dan
   3) Seksi Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air;
e. Bidang Pemakaman, terdiri atas:
   1) Seksi Perencanaan Pemakaman;
   2) Seksi Pemakaman; dan
   3) Seksi Pelayanan Pemakaman;
f. Suku Dinas Kota Administrasi, terdiri atas:
   1) Subbagian Tata Usaha;
   2) Seksi Perencanaan;
   3) Seksi Taman dan Hutan Kota; dan
   4) Seksi Jalur Hijau dan Pemakaman;
g. Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas:
   1) Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan, terdiri atas:
      a) Subbagian Tata Usaha;
      b) Seksi Pelayanan Informasi; dan
      c) Seksi Prasarana dan Sarana;
   2) Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
   3) Unit Pengadaan Tanah Pertamanan dan Hutan Kota yang membawahi Subbagian Tata Usaha; dan
   4) Pusat Data dan Informasi Pertamanan dan Hutan Kota yang membawahi Subbagian Tata Usaha;

Secara rinci struktur organisasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta terlihat pada bagan dibawah.



Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

1.5 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2023, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 (RPD 2023-2026) dan Rencana Strategis Perangkat

Daerah Tahun 2023-2026 (Renstra 2023-2026) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022. Dalam rangka mendukung pencapaian salah satu fokus perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPD 2023-2026 yaitu *built environment dimension* yang kemudian diturunkan menjadi salah satu tujuan RPD yaitu tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon, maka Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebagai SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki mandat penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada sub urusan pertamanan dan pemakaman, merumuskan aspek dan isu strategis pada bidang tersebut dengan mempertimbangkan telaahan RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024, dan RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030. Aspek dan isu strategis tersebut yaitu;

1. Peningkatan kuantitas Ruang Terbuka Hijau

   Terjaminnya ketersediaan RTH yang memadai dan berkualitas harus menjadi arahan pembangunan DKI Jakarta mengingat permasalahan mendasar kota bermula dari penataan ruang. Peran penting RTH dalam lingkungan kota dapat menjadi solusi terwujudnya lingkungan kota yang sehat. Keterbatasan lahan terbuka, pengelolaan lahan dan kepemilikan lahan di lingkungan perkotaan merupakan masalah terbesar yang dihadapi dalam perencanaan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta, sehingga diperlukan inovasi pemikiran dan perubahan paradigma yang mampu mengoptimalisasi ruang kota yang tersedia untuk memenuhi fungsi Ruang Terbuka Hijau. Penambahan kuantitas RTH disini meliputi penambahan luasan dan tutupan lahan untuk RTH taman, makam, jalur hijau dan hutan di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan kewenangan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

2. Peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau

   Ruang Terbuka Hijau yang berkualitas merupakan salah satu bentuk pembangunan berkelanjutan, yang berperan dalam menyeimbangkan kegiatan pembangunan infrastruktur dan kawasan terbangun di perkotaan. Peningkatan kualitas RTH harus terus dilakukan menyesuaikan (adaptif) dengan perkembangan kota yang selalu berubah serta kebutuhan masyarakatnya. Peningkatan kualitas bisa dari peningkatan fungsi RTH selain fungsi ekologis dan estetika, seperti fungsi sosial budaya, fungsi ekonomi dan fungsi mitigasi bencana. Selain itu bisa juga dari pengembangan inovasi terhadap elemen-elemen lanskap perkotaan dan pengembangan jejaring ruang hijau-biru untuk pemerataan sebaran RTH di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta.

3. Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

   Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memiliki tupoksi memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pertamanan, kehutanan dan pemakaman. Pelayanan tersebut harus terus ditingkatkan agar tercapai pelayanan yang prima yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya dengan pengembangan sistem pelayanan yang mudah, cepat dan terintegrasi.

   Selain itu, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota juga memiliki tupoksi dalam pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Pengembangan peran serta ini bisa dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan penyuluhan dan pelatihan, masyarakat berperan aktif dalam mengaktivasi taman, memberdayakan Kelompok Tani Hutan, dan lain sebagainya.

Upaya pemberdayaan mayarakat ini perlu terus ditingkatkan agar Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.

4. Peningkatan produktifitas dan integritas kerja aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik

   Aparatur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota harus terus mengembangkan kapasitas dan kompetensinya dalam rangka mengoptimalkan produktivitas individu yang secara langsung akan meningkatkan output dan outcome pencapaian tujuan organisasi. Selain itu aparatur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota juga dituntut untuk meningkatkan integritas untuk mengoptimalkan pemberian pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan LKIP Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut:

BAB I - PENDAHULUAN
Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tujuan dan manfaat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, gambaran singkat tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, aspek strategi dan permasalahan utama yang dihadapi, serta sistematika penulisan LKIP Tahun 2023.

BAB II - PERENCANAAN KINERJA
Menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 serta isi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta tahun 2023.

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA
Menjelaskan capaian kinerja dan capaian strategis kinerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 perbandingan capaian dengan tahun-tahun sebelumnya, analisa faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja, realisasi anggaran serta analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

BAB IV - PENUTUP
Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta di tahun 2023 serta saran perbaikan untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENSTRA DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA

Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang digunakan sebagai dasar penyusunan LKIP adalah Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Untuk periode 2023-2026, karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah, maka daerah tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, oleh karena itu penyusunan Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Hal ini sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Kemudian di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sudah mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 3/SE/2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Daerah Tahun 2023-2026.

Visi RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 adalah "Ibukota NKRI yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global". Visi RPJPD ini kemudian diturunkan ke level tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Adapun salah satu tujuan RPD yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yaitu Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan. Kemudian di tingkat sasaran RPD adalah Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon. Dengan mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPD 2023-2026 tersebut, kemudian dijabarkan tujuan dan sasaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota untuk tahun 2023-2026, yaitu:

a. Tujuan

Tujuan Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan Tutupan Lahan Melalui Perluasan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota
2) Penyediaan Ruang Terbuka dan Infrastruktur Hijau yang Inklusif dan Berkualitas

b. Sasaran

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti di atas, maka sasaran Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta dijabarkan sebagai berikut:

1) Sasaran 1 : Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan
2) Sasaran 2 : Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau

Selanjutnya ditentukan target dari setiap indikator tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tahun 2023-2026.

Tabel 1 Target Tujuan Renstra Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
						2023	2024	2025	2026	
1	Peningkatan Tutupan Lahan Melalui Perluasan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota	Indeks Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan adalah Nilai yang menggambarkan kualitas lahan dalam suatu wilayah pada waktu tertentu berdasarkan luas tutupan lahan Rumus perhitungan: IKL = 100- [(84,3-(ITL x 100)) x $\frac{50}{54,3}$] Sumber Data: Pengukuran Mandiri	Nilai	26,25	26,75	27,25	27,75	28,25	28,25
2	Penyediaan Ruang Terbuka dan Infrastruktur Hijau yang Inklusif dan Berkualitas	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Hijau adalah RTH Taman, Makam, Jalur Hijau dan Hutan. Ditargetkan dilakukan penambahan RTH setiap tahunnya seluas 6 Ha (09%) dari hasil pengadaan lahan dan serah terima fasos fasum. Rumus perhitungan = luas total RTH di tahun (n) dibagi luas daratan DKI Jakarta dikali 100% Luas Daratan DKI Jakarta 66.150 Ha atau 661,5 km^2 Sumber Data : Pengukuran Mandiri	%	5,176	5,185	5,194	5,203	5,212	5,212

Tabel 2 Target Sasaran Renstra Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
							2023	2024	2025	2026	
1	Peningkatan Tutupan Lahan Melalui Perluasan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota	Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan	Persentase Penambahan Luas dan Kualitas Lahan Ruang Terbuka Hijau Hutan	Persentase luas hutan dibawah pengelolaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang telah dilakukan pembangunan/penataan/penghijauan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas hutan. Adapun keseluruhan luas lahan hutan yang dikelola oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota adalah 299,72 Ha. Rumus perhitungan : Luas pembangunan/penataan/penghijauan hutan dibagi Luas hutan yang dikelola Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dikali 100% Sumber Data : Pengukuran Mandiri	%	73,91	75,58	76,91	78,25	79,58	79,58
2	Penyediaan Ruang Terbuka dan Infrastruktur Hijau yang Inklusif dan Berkualitas	Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau	Persentase Wilayah Kelurahan dengan Infrastruktur Hijau-Biru Terintegrasi	Infrastruktur hijau-biru terintegrasi adalah penyediaan sumur resapan/bioswale/kolam retensi/rain garden/embung pada lahan ruang terbuka hijau yang dikelola oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Rumus perhitungan = jumlah kelurahan yang memiliki infrastruktur hijau-biru dibagi jumlah total kelurahan di 5 wilayah DKI Jakarta (262 kelurahan) dikali 100%.	%	25	27	30	34	38	38

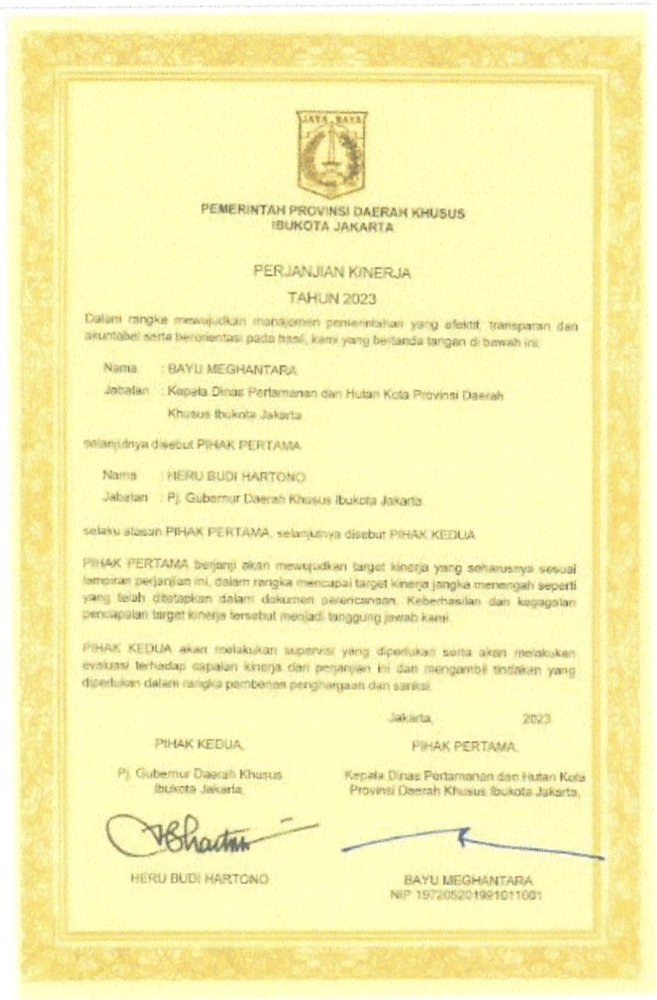
Dengan mengacu pada tujuan dan sasaran tersebut, ditetapkanlah Indikator Utama (IKU) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Berikut target dan capaian IKU Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tahun 2023-2026:

Tabel 3 Indikator Kinerja Utama 2023-2026

No	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Target Kinerja				Definisi Operasional
				2023	2024	2025	2026	
1	Penyediaan Ruang Terbuka dan Infrastruktur Hijau yang Inklusif dan Berkualitas	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Persen	5,185	5,194	5,203	5,212	Ruang Terbuka Hijau adalah ruang terbuka hijau Taman, Makam, Jalur Hijau dan Hutan. Ditargetkan dilakukan penambahan RTH setiap tahunnya seluas 6 Ha (09%) dari hasil pengadaan lahan dan serah terima fasos fasum.
2	Peningkatan Tutupan Lahan Melalui Perluasan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota	Indeks Kualitas Lahan	Nilai	26,75	27,25	27,75	28,25	Indeks Kualitas Lahan adalah Nilai yang menggambarkan kualitas lahan dalam suatu wilayah pada waktu tertentu berdasarkan luas tutupan lahan.
3	Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau	Persentase wilayah kelurahan dengan infrastruktur hijau - biru terintegrasi	Persen	27	30	34	38	Infrastruktur hijau-biru terintegrasi adalah penyediaan sumur resapan/bioswale/kolam retensi/rain garden/embung pada lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.
4	Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan	Persentase penambahan luas dan kualitas lahan ruang terbuka hijau hutan	Persen	75,58	76,91	78,25	79,58	Persentase luas hutan dibawah pengelolaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang telah dilakukan pembangunan/penataan/ penghijauan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas hutan.

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Dalam Perjanjian Kinerja Eselon II tahun 2023, terdiri atas sasaran strategis, sasaran khusus dan sasaran operasional. Perkin tersebut ditandatangani bersama antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tahun 2023:



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAYU MEGHANTARA
Jabatan : Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HERU BUDI HARTONO
Jabatan : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2023

PIHAK KEDUA,
Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

HERU BUDI HARTONO

PIHAK PERTAMA,
Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

BAYU MEGHANTARA
NIP 197205201991011001

Gambar 2 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota 2023

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2023

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
SASARAN STRATEGIS										
1	Penyediaan Ruang Terbuka dan Infrastruktur Hijau yang Inklusif dan Berkualitas	1	Persentase Ruang Terbuka Hijau	e-SAKIP	5,176	5,176	5,176	5,185	5,185	Persen
2	Peningkatan Tutupan Lahan Melalui Perluasan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota	1	Indeks Kualitas Lahan	e-SAKIP	N/A	N/A	N/A	26,75	26,75	Nilai
3	Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau	1	Persentase wilayah kelurahan dengan infrastruktur hijau - biru terintegrasi	e-SAKIP	25	25	25	27	27	Persen
4	Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan	1	Persentase penambahan luas dan kualitas lahan ruang terbuka hijau hutan	e-SAKIP	73,91	73,91	73,91	75,58	75,58	Persentase
5	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	e-Monev KSD	N/A	100	100	100	100	Persen
6	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	e-Monev KSD	N/A	N/A	100	100	100	Persen

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
7	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	e-Monev KSD	N/A	N/A	100	N/A	100	Persen
8	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir	e-Monev KSD	N/A	N/A	100	100	100	Persen
9	Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Perbaikan kualitas lingkungan hidup Sub KSD Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim	e-Monev KSD	100	100	100	100	100	Persen
10	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	100	100	100	100	100	Persen
11	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Pengembangan Transit Oriented Development (TOD)	e-Monev KSD	N/A	N/A	100	100	100	Persen

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
12		2	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastuktur Pelengkapnya	e-Monev KSD	N/A	100	100	100	100	Persen
SASARAN KHUSUS										
13	Terselenggaranya pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu	1	Persentase penyelesaian penginputan data pengadaan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan pada sistem informasi Jakarta Satu sesuai standar	e-Kinerja	N/A	15%	30%	100%	100%	Persentase
14	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
15	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat
16	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
17	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	N/A	N/A	N/A	A (82)	A (82)	Predikat
18	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	1	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	e-Kinerja	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase
19	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	e-Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
20	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	e-Kinerja	N/A	10%	55%	100%	100%	Presentase
21	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	N/A	N/A	N/A	80%	80%	Presentase
22	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	e-Kinerja	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
23	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	N/A	N/A	50%	50%	100%	Persentase
24	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	N/A	40%	80%	100%	100%	Persentase
25	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	N/A	N/A	N/A	71%	71%	Persen
SASARAN OPERASIONAL										
26	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
27	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
28	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	Survei Kepuasan Masyarakat	Jaksurvei	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50	Indeks
29	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	25%	25%	25%	25%	100%	Persentase

Berkaitan dengan penganggaran di tahun 2023, berikut pagu anggaran yang ditetapkan di awal tahun dan pagu perubahan adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Pagu Anggaran Tahun 2023

Kode	Program	PAGU ANGGARAN	
		Pagu Awal (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHAYATI)	973.437.887.152	988.312.698.390
3.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	378.753.039.195	384.585.458.632
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	44.891.927.336	45.785.002.568
3.28.04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	284.042.719	284.042.719
3.28.05	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.180.413.588	1.180.413.588
3.28.06	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	496.973.225	496.973.225
	Total	**1.399.044.283.215**	**1.420.644.589.122**

2.3 TUJUAN DAN SASARAN RPD 2023-2026

Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan sebuah konsep RPD 2023-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. 6 Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025;
2. 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024;
3. 5 Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022;
4. 6 Isu-isu strategis 2023-2026.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut teridentifikasi empat dimensi yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode selanjutnya. Keempat dimensi tersebut yaitu; dimensi lingkungan bangun (*built environment*), dimensi perekonomian (*economic*), dimensi manusia (*human*), dan dimensi pemerintahan (*governance*). Dimensi lingkungan-bangun adalah dimensi perencanaan yang berkaitan dengan ruang fisik kota yang dibangun dalam rangka menyediakan sarana bagi segala kegiatan manusia dalam bertinggal dan berusaha. Dimensi perekonomian merupakan dimensi perencanaan yang menyentuh upayaupaya manusia dalam meningkatkan derajat hidupnya melalui kegiatankegiatan bernilai ekonomi. Dimensi manusia adalah dimensi perencanaan yang berkaitan dengan kualitas kehidupan dan interaksi manusia dengan sesama. Sedangkan dimensi pemerintahan adalah dimensi perencanaan yang fokus kepada kualitas tata kelola pemerintah sebagai pihak yang memfasilitasi hak-hak warga dalam bertinggal di kota dan menjamin akses serta kolaborasi pembangunan yang inklusif. Keempat dimensi ini selanjutnya menjadi dasar perumusan konsep RPD yang kemudian diturunkan menjadi rangkaian rumusan tujuan dan sasaran Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026.

Berdasarkan konsep RPD tersebut masing-masing dimensi kemudian dielaborasikan menjadi 4 tujuan dengan 17 sasaran turunannya. Adapun tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan tupoksi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota adalah sebagai berikut:

- Tujuan : Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan
- Sasaran : Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon

Berdasarkan tujuan dan sasaran pada RPD 2023-2026 seperti pada tabel diatas, kemudian dijabarkan pada level tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota 2023-2026, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6 Tujuan dan Sasaran RPD dan Renstra 2023-2026

Tujuan/Sasaran RPD	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target				Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan		Indeks Kota Layak Huni	Indeks	62,6 (2017)	65	66	67	68	68
Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	18.5 (2022)	19.3	20	20.5	22.3	22.3
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	54.43 (2021)	54.93	55.43	55.93	56.43	56.43
	Peningkatan Tutupan Lahan Melalui Perluasan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota	Indeks Kualitas Lahan	Nilai	26,25	26,75	27,25	27,75	28,25	28,25
	Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan	Persentase Penambahan Luas dan Kualitas Lahan Ruang Terbuka Hijau Hutan	%	73,91	75,58	76,91	78,25	79,58	79,58
	Penyediaan Ruang Terbuka dan Infrastruktur Hijau yang Inklusif dan Berkualitas	Persentase Ruang Terbuka Hijau	%	5,176	5,185	5,194	5,203	5,212	5,212
	Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau	Persentase Wilayah Kelurahan dengan Infrastruktur Hijau-Biru Terintegrasi	%	25	27	30	34	38	38

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2023

Pada bab ini akan dijabarkan realisasi target dan analisa pencapaian dari indikator kinerja Eselon II pada tahun 2023. Berikut adalah realisasi kinerja Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 secara keseluruhan:

Tabel 7 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Triwulan				Target Tahunan	Triwulan				Realisasi Tahunan
					I	II	III	IV		I	II	III	IV	
SASARAN STRATEGIS														
1	Penyediaan Ruang Terbuka dan Infrastruktur Hijau yang Inklusif dan Berkualitas	1	Persentase Ruang Terbuka Hijau	e-SAKIP	5,176	5,176	5,176	5,185	5,185	-	5,18	5,18	5,214	5,214
2	Peningkatan Tutupan Lahan Melalui Perluasan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota	1	Indeks Kualitas Lahan	e-SAKIP	N/A	N/A	N/A	26,75	26,75	-	-	-	27,17	27,17
3	Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau	1	Persentase wilayah kelurahan dengan infrastruktur hijau - biru terintegrasi	e-SAKIP	25	25	25	27	27	-	25	25	27,8	27,8

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Triwulan				Target Tahunan	Triwulan				Realisasi Tahunan
					I	II	III	IV		I	II	III	IV	
4	Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan	1	Persentase penambahan luas dan kualitas lahan ruang terbuka hijau hutan	e-SAKIP	73,91	73,91	73,91	75,58	75,58	-	73,91	73,91	76,39	76,39
5	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	e-Monev KSD	N/A	100	100	100	100	-	100	100	100	100
6	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	e-Monev KSD	N/A	N/A	100	100	100	-	-	100	100	100
7	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	e-Monev KSD	N/A	N/A	100	N/A	100	-	-	100	-	100

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Triwulan				Target Tahunan	Triwulan				Realisasi Tahunan
					I	II	III	IV		I	II	III	IV	
8	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir	e-Monev KSD	N/A	N/A	100	100	100	-	-	100	100	100
9	Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Perbaikan kualitas lingkungan hidup Sub KSD Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim	e-Monev KSD	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100
10	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100
11	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Pengembangan Transit Oriented Development (TOD)	e-Monev KSD	N/A	N/A	100	100	100	-	-	100	100	100

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Triwulan				Target Tahunan	Triwulan				Realisasi Tahunan
					I	II	III	IV		I	II	III	IV	
12		2	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastuktur Pelengkapnya	e-Monev KSD	N/A	100	100	100	100	-	100	100	100	100
SASARAN KHUSUS														
13	Terselenggaranya pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu	1	Persentase penyelesaian penginputan data pengadaan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan pada sistem informasi Jakarta Satu sesuai standar	e-Kinerja	N/A	15%	30%	100%	100%	-	15	30	100	100
14	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	-	3	-	-	3 (WTP)
16	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta	e-Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Triwulan				Target Tahunan	Triwulan				Realisasi Tahunan
					I	II	III	IV		I	II	III	IV	
	unggulan Perangkat Daerah		respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.											
17	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	N/A	N/A	N/A	82	82	-	-	-	74,75	74,75
18	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	1	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	e-Kinerja	N/A	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%
19	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	e-Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	e-Kinerja	N/A	10%	55%	100%	100%	-	10,12%	71,82%	100%	100%

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Triwulan				Target Tahunan	Triwulan				Realisasi Tahunan
					I	II	III	IV		I	II	III	IV	
21	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	N/A	N/A	N/A	80%	80%	-	-	-	91,85%	91,85%
22	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	e-Kinerja	N/A	N/A	N/A	100%	100%	-	-	-	89,88%	89,88%
23	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	N/A	N/A	50%	50%	100%	-	-	50%	50%	100%
24	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	N/A	40%	80%	100%	100%	-	40%	80%	100%	100%
25	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	N/A	N/A	N/A	71%	71%	-	-	-	95,54%	95,54%
SASARAN OPERASIONAL														
26	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	87,50%
27	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90,65%	92,43%	89,33%	93,10%

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Triwulan				Target Tahunan	Triwulan				Realisasi Tahunan
					I	II	III	IV		I	II	III	IV	
28	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	Survei Kepuasan Masyarakat	Jaksurvei	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	93,22	88,7	89,85	90,1
29	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	25%	25%	25%	25%	100%	25%	12,76%	12,83%	13,08%	63,670%

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan dari 29 indikator yang diampu oleh Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta tahun 2023, indikator yang tercapai sesuai target sebanyak 24 indikator, sementara yang tidak tercapai sebanyak 5 indikator. Jika dirinci lagi, untuk sasaran strategis yang terdiri atas indikator dari Renstra dan KSD (Kegiatan Strategis Daerah) tercapai keseluruhan sebanyak 12 indikator. Untuk sasaran khusus tercapai sesuai target sebanyak 11 indikator dan 2 indikator tidak tercapai Sementara sasaran operasional dari 4 indikator, untuk indikator survei kepuasan masyarakat tercapai 90,1 dari target 88,5, sementara untuk 3 indikator lainnya tidak tercapai. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 8 berikut:

Tabel 8 Rekapitulasi Kinerja Organisasi Tahun 2023

No	Kelompok Sasaran	Jumlah indikator	Tercapai	Tidak Tercapai
1	Sasaran Strategis	12	12	0
2	Sasaran Khusus	13	11	2
3	Sasaran Operasional	4	1	3
	Total	29	24	5

Selanjutnya, akan dijelaskan secara lebih mendetail terkait capaian dari masing-masing target kinerja pada sub bab berikut.

3.2 CAPAIAN STRATEGIS KINERJA

3.2.1 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Kelompok sasaran strategis terdiri atas indikator tujuan dan sasaran organisasi yang termuat dalam Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 serta indikator KSD (Kegiatan Strategis Daerah) tahun 2023. Pada tabel 9 dibawah disajikan capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran Dinas di tahun 2023:

Tabel 9 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Tutupan Lahan Melalui Perluasan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota	Indeks Kualitas Lahan	26,75	27,17	101,6%
2	Penyediaan Ruang Terbuka dan Infrastruktur Hijau yang Inklusif dan Berkualitas	Persentase Ruang Terbuka Hijau	5,185	5,214	100,6%
No	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
3	Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan	Persentase Penambahan Luas dan Kualitas Lahan Ruang Terbuka Hijau Hutan	75,58	76,39	101,1%

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4	Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau	Persentase Wilayah Kelurahan dengan Infrastruktur Hijau-Biru Terintegrasi	27	27,8	103%

Dari keempat indikator tujuan sasaran di atas, keseluruhan indikator tercapai sesuai target yang ditetapkan. Berikut penjelasan lebih rinci untuk masing-masing indikator.

TUJUAN 1
"Peningkatan Tutupan Lahan Melalui Perluasan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota"

Dalam rangka pencapaian tujuan pertama yaitu Peningkatan Tutupan Lahan Melalui Perluasan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota dapat diukur dengan indikator kinerja berupa Indeks Kualitas Lahan (IKL). Indikator ini merupakan indikator tujuan yang tertuang pada Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota 2023-2026, sehingga pada tahun 2023 merupakan tahun pertama evaluasi pelaksanaan sesuai dengan Renstra. Indeks Kualitas Lahan ini merupakan salah satu komponen dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dimana IKLH menjadi indikator yang diampu Dinas Lingkungan Hidup. IKL merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut. Untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, karena tidak memiliki lahan gambut maka perhitungan IKL hanya memperhitungkan dari perhitungan IKTL.

Metode perhitungan indeks kualitas lahan dapat diuraikan sebagai berikut:
Pada kawasan di Provinsi DKI jakarta dilakukan deliniasi Tutupan Lahan Vegetasi Hutan dan Non Hutan, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Untuk mendapatkan nilai IKTL, terlebih dahulu menghitung ITL, dengan rumus yang digunakan adalah:

$$ITL = \frac{(\sum Luas\ TLH\ x\ 1)\ +\ (\sum Luas\ TLNH\ x\ 0{,}6)}{LWil}$$

Dimana
TLH = Tutupan Lahan Vegetasi Hutan)
TLNH = Tutupan Lahan Vegetasi Non Hutan)
LWil = Luas Wilayah Administrasi)

Kemudian untuk mendapatkan nilai IKTL, dengan menggunakan rumus berikut:

$$IKTL = 100 - \left[(84{,}3 - (ITL\ x\ 100))\ x\ \frac{50}{54{,}3}\right]$$

Dimana:
IKTL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan
ITL : Indeks Tutupan Lahan

Setelah dilakukan perhitungan atas data-data yang tersedia, didapatkan realisasi IKL di tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 10 Capaian Indeks Kualitas Lahan

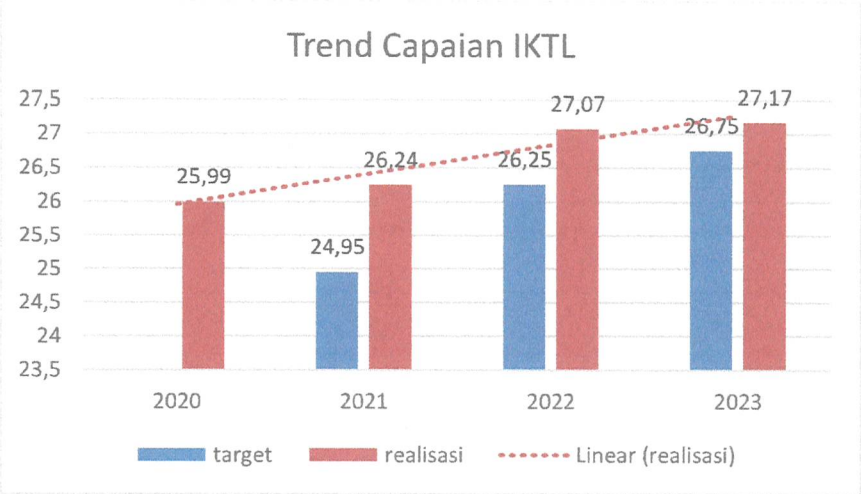
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Tutupan Lahan Melalui Perluasan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota	Indeks Kualitas Lahan	26,75	27,17	101,6%

Nilai IKTL juga dapat dilihat distribusinya pada 6 wilayah administrasi, Kota Jakarta Barat memiliki nilai IKTL terendah yaitu 23,13 sementara nilai IKTL tertinggi berada di Kab. Kepulauan Seribu sebesar 86,92. Berikut adalah capaian IKTL masing-masing kota/kabupaten administrasi:

Tabel 11 Sebaran Capaian Indeks Kualitas Lahan Berdasarkan Wilayah

Kabupaten/ Kota	Kab Adm. Kepulauan Seribu	Kota Jakarta Barat	Kota Jakarta Selatan	Kota Jakarta Pusat	Kota Jakarta Timur	Kota Jakarta Utara	Provinsi DKI Jakarta
Nilai IKTL	86,92	23,13	27,06	26,08	26,83	26,52	27,17

Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Provinsi DKI Jakarta telah berada 0,42 point diatas target nilai IKL tahun 2023, yakni sebesar 27,17.



Gambar 3 Trend Capaian Nilai IKTL Provinsi DKI Jakarta 2020-2023

Apabila melihat perkembangan nilai IKTL tahunan sebagaimana disajikan pada grafik diatas, terlihat bahwa dari tahun 2020 sampai dengan 2023, indeks IKTL mengalami trend kenaikan yang stabil, hingga pada tahun 2023 didapatkan nilai 27,17.

Peningkatan nilai IKTL didapatkan dari meningkatnya luas kelas tutupan lahan sebagai dasar penetapan nilai vegetasi non-hutan bila dibandingkan dengan tahun 2022. Tercapainya target tutupan lahan pada tahun 2023 mencerminkan keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pemetaan penggunaan lahan termutakhir dalam sekala yang detil 1:5.000 sehingga dapat teridentifikasi area bervegetasi dalam penggunaan lahan RTH yang berukuran kecil seperti vegetasi di median jalan, pulau-pulau jalan dan jalur pejalan kaki. Di samping itu, beberapa taman kota yang mengalami pembaharuan maupun peningkatan juga turut andil dalam bertambahnya area bervegetasi.

Beberapa usaha yang telah dan akan terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui instansi terkait untuk memperbaiki nilai IKTL antara lain:

a) Dari sisi kebijakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki payung hukum baru terkait RTH, yaitu Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No. 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau.

b) Terlaksananya kegiatan penghijauan dan reboisasi dengan melakukan penanaman pohon sebanyak 253.666 jenis pohon pelindung dan pohon produktif di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta.
c) Melakukan updating atau pemutakhiran data spasial penggunaan tanah skala detil 1:5.000, sehingga teridentifikasi area bervegetasi yang berukuran sempit seperti vegetasi di median jalan, pulau-pulau jalan dan jalur pejalan kaki.
d) Melanjutkan pembangunan taman seluas 67.327 m2, yang tersebar di empat wilayah Kota Administrasi Jakarta. Di Jakarta Barat sebanyak tiga lokasi dengan luas area mencapai 12.319 m2, Jakarta Timur terdapat tujuh lokasi dengan total luas sebesar 16.568 m2, Jakarta Selatan memiliki 11 lokasi dengan area seluas 32.587 m2, serta Jakarta Utara sebanyak dua lokasi dengan luas mencapai 5.853 m2

Faktor pendorong yang mempengaruhi capaian IKL di tahun 2023 ini antara lain sebagai berikut:

Faktor pendorong:

a) Optimalisasi penambahan aset lahan melalui serah terima fasos dan fasum
b) Meningkatkan penanaman vegetasi mangrove pada hutan produksi dan hutan lindung
c) Menggalakkan kembali program penanaman pohon di tiap wilayah administrasi
d) Meningkatkan kerjasama penghijauan dengan pihak swasta melalui skema CSR (Corporate Social Responsibility)
e) Mendorong gedung/bangunan untuk menyediakan RTH dengan memanfaatkan atap/ roof garden
f) Melakukan updating poligon vegetasi hutan dan non hutan pada peta penggunaan lahan skala 1:5000 dengan menggunakan bantuan citra tegak satelit resolusi tinggi.
g) Melakukan pemeliharaan RTH publik dengan menambah jenis tanaman keras yang kuat agar lebih tahan terhadap angin kencang

IKL sebagai komponen dari IKLH telah dijadikan indeks kinerja pengelolan lingkungan hidup secara nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Mempertimbangkan RPJMD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka IKLH sebagai indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah juga menjadi salah satu indikator yang ditargetkan dalam dokumen RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. IKLH yang tertuang dalam RPD 2023-2026 tersebut kemudian dijabarkan dan diturunkan menjadi indikator kinerja Dinas berupa IKL yang tertuang dalam Renstra Dinas 2023-2026.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri LHK Nomor SE.4/MenLHK/Setjen/Kum.1 /4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan, target IKL Tahun 2023 dan 2024 secara nasional berturut-turut meningkat. Target Provinsi sebagaimana tertuang dalam Renstra 2023-2026, memiliki target yang lebih tinggi dari target Nasional (tabel berikut) .

Tabel 12 Perbandingan Capaian IKTL Dengan Target Nasional

Indikator Kinerja	2023	2024
Target Nasional bersadarkan Surat Edaran Menteri LHK Nomor SE.4/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2021		
Target IKL	25,13	25,23
Realisasi	27,17	N/A
Capaian	108,12%	N/A
Target Berdasarkan RPD 2023-2026		
Target IKL	26,75	27,25
Realisasi	27,17	N/A
Capaian	101,6%	N/A
Target berdasarkan Renstra 2023-2026		
Target IKL	26,75	27,25
Realisasi	27,17	N/A
Capaian	101,6%	N/A

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa IKL Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 selalu mencapai target, baik dari target secara nasional berdasarkan SE Menteri LHK maupun target Provinsi sesuai Renstra 2023-2026. Diharapkan nilai IKL Provinsi DKI Jakarta akan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. Untuk realisasi IKL di daerah provinsi lainnya secara nasional untuk tahun 2023, belum bisa diinformasikan disini karena datanya belum ada dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga capaian IKL Provinsi DKI Jakarta belum dapat dibandingkan dengan kinerja Provinsi lainnya.

TUJUAN 2
"Penyediaan Ruang Terbuka dan Infrastruktur Hijau yang Inklusif dan Berkualitas"

Dalam rangka pencapaian tujuan pertama yaitu Penyediaan Ruang Terbuka dan Infrastruktur Hijau yang Inklusif dan Berkualitas dapat diukur dengan indikator kinerja berupa Persentase Ruang Terbuka Hijau. Indikator ini merupakan indikator tujuan yang tertuang pada Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota 2023-2026, sehingga pada tahun 2023 merupakan tahun pertama evaluasi pelaksanaan sesuai dengan Renstra. Adapun untuk target dan realisasi capaian pada tahun 2023 dari indikator ini disajikan pada tabel dibawah.

Tabel 13 Capaian Indikator persentase Ruang Terbuka Hijau

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Penyediaan Ruang Terbuka dan Infrastruktur Hijau yang Inklusif dan Berkualitas	Persentase Ruang Terbuka Hijau	5,185	5,214	100,6%

Penambahan luasan RTH didapatkan melalui pengadaan lahan dari APBD dan serah terima fasos dan fasum dari BPAD. Namun pada tahun 2023, terdapat kebijakan untuk tidak ada pengadaan lahan melalui APBD dan lebih mengoptimalkan serah terima lahan fasos fasum dari BPAD. Sesuai dengan Renstra 2023-2026, setiap tahunnya ditargetkan dilakukan penambahan RTH seluas 6 Ha (09%). Rumus perhitungannya : luas total RTH di tahun (n) dibagi luas daratan DKI Jakarta dikali 100%. (Luas Daratan DKI Jakarta 66.150 Ha atau 661,5 km2).Data penambahan luasan RTH ini kemudian dilakukan penginputan data kedalam sistem https://jakartasatu.jakarta.go.id/ sebagai sistem database publik yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2023, untuk indikator persentase RTH telah tercapai melebihi dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, dari target 5,185% telah terealisasi sebesar 5,214% atau dengan capaian 100,6%. Realisasi dari penambahan luasan RTH ini didapatkan dari serah terima fasos fasum dari BPAD. Pada tahun 2023, telah dilakukan serah terima aset untuk Ruang Terbuka Hijau dari BPAD kepada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebanyak 92 bidang tanah dengan total luas 73.650,39 m2 senilai Rp. 698.103.311.219,- , dengan rincian terlampir. Dengan penambahan ini maka persentase Ruang Terbuka Hijau DKI Jakarta sampai akhir tahun 2023 tercapai sebesar 5,214%, sesuai dengan data resmi yang di rilis melalui www.jakartasatu.go.id. Berikut daftar lahan fasos fasum yang diserah terimakan dari BPAD kepada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

Tabel 14 Daftar Aset dari Serah Terima Fasos Fasum Tahun 2023

No	Pengembang	Jalan	Kelurahan	Kec	Wilayah	Vol	Sat	Nilai Rp.
1	PT. Griya Idola - (PT. Mangole Timber Jaya)	Jalan Let. Jend S Parman Kav. 62-63	Slipi	Palmerah	Jakarta Barat	108	m2	6.497.604.000

No	Pengembang	Jalan	Kelurahan	Kec	Wilayah	Vol	Sat	Nilai Rp.
2	PT. Copylas Indonesia	Jalan Joglo Raya / Jalan Meruya Selatan	Meruya Selatan	Kembangan	Jakarta Barat	114	M2	1.011.750.000
3	PT. Copylas Indonesia	Jalan Joglo Raya / Jalan Meruya Selatan	Meruya Selatan	Kembangan	Jakarta Barat	530	M2	4.703.750.000
4	PT. Copylas Indonesia	Jalan Joglo Raya / Jalan Meruya Selatan	Meruya Selatan	Kembangan	Jakarta Barat	46	M2	408.250.000
5	PT. Copylas Indonesia	Jalan Joglo Raya / Jalan Meruya Selatan	Meruya Selatan	Kembangan	Jakarta Barat	39	M2	346.125.000
6	PT. Copylas Indonesia	Jalan Joglo Raya / Jalan Meruya Selatan	Meruya Selatan	Kembangan	Jakarta Barat	133	M2	1.180.375.000
7	PT. Copylas Indonesia	Jalan Joglo Raya / Jalan Meruya Selatan	Meruya Selatan	Kembangan	Jakarta Barat	209	M2	1.854.875.000
8	PT. Copylas Indonesia	Jalan Joglo Raya / Jalan Meruya Selatan	Meruya Selatan	Kembangan	Jakarta Barat	99	M2	878.625.000
9	PT. Copylas Indonesia	Jalan Joglo Raya / Jalan Meruya Selatan	Meruya Selatan	Kembangan	Jakarta Barat	205	M2	1.819.375.000
10	PT. Copylas Indonesia	Jalan Joglo Raya / Jalan Meruya Selatan	Meruya Selatan	Kembangan	Jakarta Barat	139	M2	1.233.625.000
11	PT. Copylas Indonesia	Jalan Joglo Raya / Jalan Meruya Selatan	Meruya Selatan	Kembangan	Jakarta Barat	300	M2	2.662.500.000
12	PT. Copylas Indonesia	Jalan Joglo Raya / Jalan Meruya Selatan	Meruya Selatan	Kembangan	Jakarta Barat	3564	M2	31.630.500.000
13	PT. Copylas Indonesia	Jalan Joglo Raya / Jalan Meruya Selatan	Meruya Selatan	Kembangan	Jakarta Barat	599	M2	5.316.125.000
14	PT. Copylas Indonesia	Jalan Joglo Raya / Jalan Meruya Selatan	Meruya Selatan	Kembangan	Jakarta Barat	50	M2	443.750.000
15	PT. Copylas Indonesia	Jalan Joglo Raya / Jalan Meruya Selatan	Meruya Selatan	Kembangan	Jakarta Barat	50	M2	443.750.000
16	PT. Copylas Indonesia	Jalan Joglo Raya / Jalan Meruya Selatan	Meruya Selatan	Kembangan	Jakarta Barat	7566	M2	67.148.250.000
17	PT. Copylas Indonesia	Jalan Joglo Raya / Jalan Meruya Selatan	Meruya Selatan	Kembangan	Jakarta Barat	240	M2	2.130.000.000
18	PT. Copylas Indonesia	Jalan Joglo Raya / Jalan Meruya Selatan	Meruya Selatan	Kembangan	Jakarta Barat	149	M2	1.466.607.000
19	PT. Copylas Indonesia	Jalan Joglo Raya / Jalan Meruya Selatan	Meruya Selatan	Kembangan	Jakarta Barat	137	M2	1.348.491.000
20	PT. Copylas Indonesia	Jalan Joglo Raya / Jalan Meruya Selatan	Meruya Selatan	Kembangan	Jakarta Barat	43	M2	423.249.000
21	PT. Copylas Indonesia	Jalan Joglo Raya / Jalan Meruya Selatan	Meruya Selatan	Kembangan	Jakarta Barat	41	M2	403.563.000

No	Pengembang	Jalan	Kelurahan	Kec	Wilayah	Vol	Sat	Nilai Rp.
22	PT. Patal Indonesia	Jalan Raya Bekasi/KRT Rajiman	Penggilingan	Cakung	Jakarta Timur	662	M2	5.999.706.000
23	PT. Patal Indonesia	Jalan Raya Bekasi/KRT Rajiman	Penggilingan	Cakung	Jakarta Timur	1046	M2	9.479.898.000
24	PT. Patal Indonesia	Jalan Raya Bekasi/KRT Rajiman	Penggilingan	Cakung	Jakarta Timur	2653	M2	24.044.139.000
25	PT. Patal Indonesia	Jalan Raya Bekasi/KRT Rajiman	Penggilingan	Cakung	Jakarta Timur	329	M2	2.981.727.000
26	PT. Patal Indonesia	Jalan Raya Bekasi/KRT Rajiman	Penggilingan	Cakung	Jakarta Timur	300	M2	2.718.900.000
27	PT. Patal Indonesia	Jalan Raya Bekasi/KRT Rajiman	Penggilingan	Cakung	Jakarta Timur	500	M2	4.531.500.000
28	PT. Patal Indonesia	Jalan Raya Bekasi/KRT Rajiman	Penggilingan	Cakung	Jakarta Timur	1309	M2	11.863.467.000
29	PT. Patal Indonesia	Jalan Raya Bekasi/KRT Rajiman	Penggilingan	Cakung	Jakarta Timur	282	M2	2.555.766.000
30	PT. Patal Indonesia	Jalan Raya Bekasi/KRT Rajiman	Penggilingan	Cakung	Jakarta Timur	56	M2	507.528.000
31	Perum Perumnas	Jalan Sentra Primer Timur	Pulogebang	Cakung	Jakarta TIMUR	4680	m2	3.753.360.000
32	PT. Mitra Sindo Sukses	Jl. Kayu Tinggi	Cakung Timur	Cakung	Jakarta Timur	3936	m2	47.999.520.000
33	PT Wilhara Prima Reality	Bukit Gading Raya	Kelapa Gading Barat	Kelapa Gading	Jakarta Utara	1372	m2	71.128.596.000
34	PT Wilhara Prima Reality	Bukit Gading Raya	Kelapa Gading Barat	Kelapa Gading	Jakarta Utara	771	m2	39.970.953.000
35	PT Wilhara Prima Reality	Bukit Gading Raya	Kelapa Gading Barat	Kelapa Gading	Jakarta Utara	6811	m2	143.460.093.000
36	PT Grand Asia	Bangku Bahan Batu Alam	Pinangsia	Tamansari	Jakarta Barat	16	Buah	101.552.900
37	PT Grand Asia	Pengisian Tanah Humus Tebal 30cm+Tree Grate	Pinangsia	Tamansari	Jakarta Barat	86	m3	116.606.089
38	PT Grand Asia	Kenari	Pinangsia	Tamansari	Jakarta Barat	5	Batang	12.532.567
39	PT Grand Asia	Trembesi	Pinangsia	Tamansari	Jakarta Barat	1	Batang	1.671.480
40	PT Grand Asia	Pohon Sawo Kecik	Pinangsia	Tamansari	Jakarta Barat	19	Batang	17.879.043

No	Pengembang	Jalan	Kelurahan	Kec	Wilayah	Vol	Sat	Nilai Rp.
41	PT Grand Asia	Flamboyan Kuning	Pinangsia	Tamansari	Jakarta Barat	16	Batang	31.265.011
42	PT Grand Asia	Pulai	Pinangsia	Tamansari	Jakarta Barat	6	Batang	20.040.805
43	PT Grand Asia	Kemuning Daun Mini	Pinangsia	Tamansari	Jakarta Barat	144	m2	57.829.038
44	PT Grand Asia	Aralia	Pinangsia	Tamansari	Jakarta Barat	29	m2	9.718.321
45	PT Grand Asia	Bugenvil Bunga Ungu	Pinangsia	Tamansari	Jakarta Barat	127	m2	84.719.873
46	PT Grand Asia	Pretty Pink	Pinangsia	Tamansari	Jakarta Barat	106	m2	35.739.343
47	PT Grand Asia	Tiang Lampu Pedestrian dan Taman	Pinangsia	Tamansari	Jakarta Barat	5	Unit	290.045.190
48	PT Grand Asia	Tanah Humus Tebal 30 cm	Pinangsia	Tamansari	Jakarta Barat	50	m3	102.958.529
49	PT Grand Asia	Trembesi	Pinangsia	Tamansari	Jakarta Barat	4	Batang	6.685.920
50	PT Grand Asia	Flamboyan Kuning	Pinangsia	Tamansari	Jakarta Barat	13	Batang	25.402.822
51	PT Grand Asia	Palem Sadeng	Pinangsia	Tamansari	Jakarta Barat	9	Batang	26.312.226
52	PT Grand Asia	Bugenvil Bunga Ungu	Pinangsia	Tamansari	Jakarta Barat	108	m2	72.129.094
53	PT Grand Asia	Pretty Pink	Pinangsia	Tamansari	Jakarta Barat	60	m2	20.102.296
54	PT Grand Asia	Pengisian Tanah Humus Tebal 30cm; Perawatan Tanaman dan Pohon Selama Masa Pemeliharaan	Pinangsia	Tamansari	Jakarta Barat	96	m3	293.642.710
55	PT Grand Asia	Pohon Bungur	Pinangsia	Tamansari	Jakarta Barat	16	Batang	148.059.240
56	PT Grand Asia	Pulai	Pinangsia	Tamansari	Jakarta Barat	6	Batang	20.040.805
57	PT Grand Asia	Lontar	Pinangsia	Tamansari	Jakarta Barat	7	Batang	70.141.908
58	PT Grand Asia	Aralia	Pinangsia	Tamansari	Jakarta Barat	56	m2	18.909.364
59	PT Grand Asia	Bugenvil Bunga Ungu	Pinangsia	Tamansari	Jakarta Barat	63	m2	42.433.606

No	Pengembang	Jalan	Kelurahan	Kec	Wilayah	Vol	Sat	Nilai Rp.
60	PT Grand Asia	Pretty Pink	Pinangsia	Tamansari	Jakarta Barat	144	m2	48.423.467
61	PT Grand Asia	Bakung Air Mancur	Pinangsia	Tamansari	Jakarta Barat	63	m2	21.128.622
62	PT Citra Abadi Mandiri	Kampung Tanah Koja/Jalan Lingkar Luar Barat	Duri Kosambi	Cengkareng	Jakarta Barat	662	m2	2.479.190.000
63	PT Citra Abadi Mandiri	Kampung Tanah Koja/Jalan Lingkar Luar Barat	Duri Kosambi	Cengkareng	Jakarta Barat	211	m2	790.195.000
64	PT Citra Abadi Mandiri	Kampung Tanah Koja/Jalan Lingkar Luar Barat	Duri Kosambi	Cengkareng	Jakarta Barat	4267	m2	15.979.915.000
65	PT Citra Abadi Mandiri	Kampung Tanah Koja/Jalan Lingkar Luar Barat	Duri Kosambi	Cengkareng	Jakarta Barat	2633	m2	9.860.585.000
66	PT Citra Abadi Mandiri	Kampung Tanah Koja/Jalan Lingkar Luar Barat	Duri Kosambi	Cengkareng	Jakarta Barat	611	m2	2.288.195.000
67	PT Citra Abadi Mandiri	Kampung Tanah Koja/Jalan Lingkar Luar Barat	Duri Kosambi	Cengkareng	Jakarta Barat	1823	m2	6.827.135.000
68	PT Citra Abadi Mandiri	Kampung Tanah Koja/Jalan Lingkar Luar Barat	Duri Kosambi	Cengkareng	Jakarta Barat	130	m2	486.850.000
69	PT Citra Abadi Mandiri	Kampung Tanah Koja/Jalan Lingkar Luar Barat	Duri Kosambi	Cengkareng	Jakarta Barat	39	m2	146.055.000
70	PT Citra Abadi Mandiri	Kampung Tanah Koja/Jalan Lingkar Luar Barat	Duri Kosambi	Cengkareng	Jakarta Barat	175	m2	655.375.000
71	PT Panca Permata Pejaten	Jalan Warungjati Barat/Jln Warung Buncit Raya	Jatipadang	Pasar Minggu	Jakarta Selatan	1236	m2	34.315.068.000
72	PT Panca Permata Pejaten	Jalan Warungjati Barat/Jln Warung Buncit Raya	Jatipadang	Pasar Minggu	Jakarta Selatan	1082	m2	639.600.000
73	PT Permata Berlian Realty (PT. Pakuwon Subentra	Jalan Permata Berlian	Grogol Utara	Kebayoran Lama	Jakarta Selatan	460	m2	9.547.300.000

No	Pengembang	Jalan	Kelurahan	Kec	Wilayah	Vol	Sat	Nilai Rp.
	Amethyst)							
74	PT Bangun Tjipta Sarana	Komplek BCS-Pisangan Timur	Pisangan Timur	Pulogadung	Jakarta Timur	2329	m2	1.164.500.000
75	Sdr Hendrik Carolus Warella q.q Yayasan Sekolah International Australia	Jalan Pejaten Barat	Ragunan	Pasar Minggu	Jakarta Selatan	393	m2	6.777.285.000
76	PT Toba Pengembang Sejahtera	Jalan Mega Kuningan Barat III Lot. 10.1-6	Kuningan Timur	Setiabudi	Jakarta Selatan	88	m2	4.387.944.000
77	PT TCP Internusa	Jalan Tanjung Mas Prima/Jalan Garuda Mas I	Tanjung Barat	Jagakarsa	Jakarta Selatan	1091	m2	7.424.255.000
78	PT Artisan Wahyu	Jalan Sultan Iskandar Muda (Jalan Arteri/Jalan Tembus Gandaria)	Kebayoran Lama Utara	Kebayoran Lama	Jakarta Selatan	1129	m2	35.986.875.000
79	PT Intiland Development (PT Dharmala Intiland)	Blok P RT 006/08	Pela Mampang	Mampang Prapatan	Jakarta Selatan	338	m2	8.786.310.000
80	PT Bahana Tirta Adhiguna	Jalan Lapangan Tembak	Kelapa Dua Wetan	Ciracas	Jakarta Timur	3767	m2	28.715.841.000
81	PT Sumbercipta Griya Utama	Jalan Senopati	Senayan	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan	72	m2	3.048.696.000
82	PT. Inti Agung Mulia	Lingkungan Perumahan Adora Town Jalan Kebembem RT 02 RW 04	Ciganjur	Jagakarsa	Jakarta Selatan	553,39	m2	6256073950
83	PT. Bojong Permai	Perumahan Bojong Indah	Rawa Buaya	Cengkareng	Jakarta Barat	1164	m2	625.068.000
84	PT. Bojong Permai	Perumahan Bojong Indah	Rawa Buaya	Cengkareng	Jakarta Barat	1133	m2	608421000
85	PT. Bojong Permai	Perumahan Bojong Indah	Rawa Buaya	Cengkareng	Jakarta Barat	485	m2	260445000
86	PT. Bojong Permai	Perumahan Bojong Indah	Rawa Buaya	Cengkareng	Jakarta Barat	671	m2	360327000
87	PT. Bojong Permai	Perumahan Bojong Indah	Rawa Buaya	Cengkareng	Jakarta Barat	675	m2	362475000
88	PT. Bojong Permai	Perumahan Bojong Indah	Rawa Buaya	Cengkareng	Jakarta Barat	484	m2	259908000
89	PT. Bojong Permai	Perumahan Bojong Indah	Rawa Buaya	Cengkareng	Jakarta Barat	1696	m2	910752000

No	Pengembang	Jalan	Kelurahan	Kec	Wilayah	Vol	Sat	Nilai Rp.
90	PT. Bojong Permai	Perumahan Bojong Indah	Rawa Buaya	Cengkareng	Jakarta Barat	1396	m2	749652000
91	PT. Bojong Permai	Perumahan Bojong Indah	Rawa Buaya	Cengkareng	Jakarta Barat	1633	m2	876921000
92	PT. Bojong Permai	Perumahan Bojong Indah	Rawa Buaya	Cengkareng	Jakarta Barat	901	m2	483837000
	Total					**73.650**	**M2**	**698.103.311.219**

Berikut Berita Acara serah terima aset fasos fasum dari BPAD:

BERITA ACARA SERAH TERIMA

TANAH SEBANYAK 3 BIDANG DENGAN TOTAL LUAS 3.296 M²
YANG TERLETAK DI JALAN LINGKAR LUAR BARAT BLOK A NOMOR 1
KELURAHAN RAWA BUAYA KECAMATAN CENGKARENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
DARI PLT. KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
KEPADA KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA
PROVINSI DKI JAKARTA

Nomor : 2671 /BA-03-03

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Lusiana Herawati, SE

   Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang beralamat di Jalan Abdul Muis Nomor 66 Kota Administrasi Jakarta Pusat. Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Dr. Bayu Meghantara, S.IP, M.Si

   Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang beralamat di Jalan K.S Tubun Nomor 1 RT 02 RW 05 Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat. Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa masing-masing pihak bertindak dalam Jabatannya sebagaimana tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan dan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
9. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Dari Pemegang Izin dan Atau Izin Pemanfaatan Ruang.
10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2017 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan BAST barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
11. Instruksi Gubernur Nomor 148 Tahun 2016 tentang Pemenuhan Kewajiban Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dari Pemegang SIPPT/IPPT;
12. Berita Acara Serah Terima Nomor 543/RR.01.01 Tanggal 18 April 2022 berupa sebagian Kewajiban Lahan Prasarana Pendidikan (S.1.B), Lahan Prasarana Sosial Budaya (S.4.B)

BERITA ACARA SERAH TERIMA

TANAH SEBANYAK 2 BIDANG DENGAN LUAS TOTAL 1.123 M² DAN 2 BUAH
PEMAGARAN YANG TERLETAK DI KOMPLEK TAMAN PALEM LESTARI
KELURAHAN CENGKARENG BARAT KECAMATAN CENGKARENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
DARI PLT. KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
KEPADA KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA
PROVINSI DKI JAKARTA

Nomor : 2467 /BA-03-03

Pada hari ini, Jum' at Tanggal Delapan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Lusiana Herawati, SE

   Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang beralamat di Jalan Abdul Muis Nomor 66 Kota Administrasi Jakarta Pusat. Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Dr. Bayu Meghantara, S.IP, M.Si

   Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang beralamat di Jalan K.S Tubun Nomor 1 RT 02 RW 05 Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat. Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa masing-masing pihak bertindak dalam Jabatannya sebagaimana tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan dan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
9. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Dari Pemegang Izin dan Atau Izin Pemanfaatan Ruang.
10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2017 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan BAST barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
11. Instruksi Gubernur Nomor 148 Tahun 2016 tentang Pemenuhan Kewajiban Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dari Pemegang SIPPT/IPPT;
12. Berita Acara Serah Terima Nomor 1730/TM.12.12 tanggal 28 Juni 2022 berupa Lahan

Gambar 4 Berita Acara Serah Terima Aset Fasos Fasum
dari BPAD kepada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

Faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi capaian penambahan persentase luasan RTH di tahun 2023 ini antara lain sebagai berikut:

Tabel 15 Faktor Pendorong dan Penghambat
Capaian Indikator Penambahan Persentase RTH 2023

No	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Tindak Lanjut
1		Penambahan luasan RTH tidak dapat melalui APBD	Optimalisasi serah terima Fasos dan Fasum
2	Tersedia lahan aset fasos fasum dari BPAD untuk RTH	Lahan belum *clean and clear*, seperti masih terdapat bangunan liar di atas lahan, tidak ada pengamanan aset (lahan tidak dipagar)	- Melakukan koordinasi dan peninjauan ulang dengan BPAD ke lokasi yang akan diserah terimakan - Lahan yang belum clean and clear dikembalikan ke BPAD dengan menambahkan catatan atas permasalahan yang ditemukan.

SASARAN 1
"Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan"

Dalam rangka pencapaian Sasaran pertama yang juga merupakan IKU Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yaitu "Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan" dapat diukur dengan indikator kinerja yaitu "Persentase Penambahan Luas dan Kualitas Lahan Ruang Terbuka Hijau Hutan". Indikator kinerja ini dukur melalui persentase luas hutan dibawah pengelolaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang telah dilakukan pembangunan/penataan/penghijauan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas hutan. Adapun keseluruhan luas lahan hutan yang dikelola oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota adalah 299,72 Ha, dengan rumus perhitungan: Luas pembangunan/penataan/ penghijauan hutan dibagi Luas hutan yang dikelola Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dikali 100%.

Tabel 16 Capaian Indikator Persentase Penambahan Luas dan Kualitas Lahan Ruang Terbuka Hijau Hutan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan	Persentase Penambahan Luas dan Kualitas Lahan Ruang Terbuka Hijau Hutan	75,58	76,39	101,1%

Terkait dengan pencapaian sasaran tersebut, pada tahun 2023, telah selesai dilakukan pembangunan pada 4 lokasi RTH hutan kota seluas total 3,76 ha. 4 lokasi pembangunan RTH hutan kota tersebut yaitu; RTH hutan kota Jalan Kostrad Raya Jakarta Selatan, RTH hutan kota Indraloka, Ceger Jakarta Timur, RTH Hutan Kota Jalan Bango, Pondok labu Jakarta Selatan dan RTH hutan kota Rorotan, Jakarta Utara. Selain itu dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini juga dilakukan penanaman bibit mangrove pada hutan lindung dan hutan produksi sejumlah 73.217 bibit yang setara dengan luasan 3,66 ha (jarak tanam 0,5 meter). Sehingga total luasan yang dilakukan pembangunan/penanaman/penghijauan sebesar 7,42 ha (capaian menjadi 76,39 %). Berikut lokasi pembangunan RTH hutan kota:

PROGRES PEMBANGUNAN RTH HUTAN
TRIWULAN IV TAHUN 2023

No	Nama RTH	Lokasi	Luas	Progres Sampai Triwulan 4	Lampiran bukti TW 4
1	RTH Hutan Jl. Kostrad Raya Jakarta Selatan	Jalan Kostrad Raya RT 001 RW 004 Kel. Petukangan Utara Kec. Pesanggrahan Jakarta	4.975 m2	Progres pembangunan 100%	
2	RTH Hutan Indraloka, Kel. Ceger, Jakarta Timur	Jl. Mandor Hasan (Taman Indraloka) Kel. Ceger Kec. Cipayung Jakarta Timur	11.644 m2	Progres pembangunan 100%	

No	Nama RTH	Lokasi	Luas	Progres Sampai Triwulan 4	Lampiran bukti TW 4
3	RTH Hutan Jl. Bango, Kel. Pondok Labu, Jakarta Selatan	Jalan Bango III RW 003 Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan	8.700 m2	Progres pembangunan 100%	
4	RTH Hutan Jl. Rorotan Jakarta Utara	Jl. Rorotan RT. 08 RW. 012 Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara	12,330 m2	Progres pembangunan 100%	

Gambar 5 Pembangunan RTH Hutan 2023

Tabel 17 Data Penanaman Mangrove Tahun 2023

No.	INSTANSI /PIHAK YANG MENANAM	TEMPAT PELAKSANAAN	JENIS BIBIT MANGROVE	JUMLAH BIBIT
1	SESKOAL	Elang Laut	Bakau Rhizopora Sp	500
2	Mangrovejkt.id bersama Adakami	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	500
3	Kemangteer Jakarta	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	100
4	Bidang Kehutanan	Tranmisi PLN	Sawo Kecik	180 Bibit
5	Lindungi Hutan bersama Jejakin dan Telkomsel	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	500
6	Mangrovejkt.id bersama Marsh Mc Lennan	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	100
7	Lindungi Hutan bersama Pt. Idemitsu Energi Indonesia	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	300
8	Kertabumi	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	28
9	Mangrovejkt.id	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	25
10	Mangrovejkt.id	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	25
11	Mangrovejkt.id bersama Grandhika Hotel	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	25
12	Mangrovejkt.id bersama Sony Indonesia	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	500
13	IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia)	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	1000
14	Bina Tunas Bangsa	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	30
15	LEVA bersama SMKN 26 Jakarta	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	100
16	Mangrovejkt.id bersama Taiwanese Chamber	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	100
17	Mangrovejkt.id bersama Derma Expres	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	100
18	UNTAR	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	90
19	KEMANGTEER	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	50
20	Lindungi Hutan bersama Honda	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	1500
21	Trisakti Lanskap	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	100
22	PT. KEPPEL LAND	Elang Laut	Bakau Rhizopora Sp	1000
23	Fransiskan Misionaris Maria (FMM)	Elang Laut	Bakau Rhizopora Sp	1000
25	Lindungi Hutan bersama Jejakin	Elang Laut	Bakau Rhizopora Sp	1000
26	Kertabumi bersama Manulife	Galatama	Bakau Rhizopora Sp	500
27	Divers Clean Action	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	75
28	SMP Islam Binakheir School	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	50
29	Binus School Simprug	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	100
30	Mangrovejkt.id bersama UOB	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	35
31	Devers Clean Action	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	10
32	Bumi Journey bersama Uni Eropa	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	35
33	Kertabumi bersama UI	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	30
34	SMPN 151 Jakarta	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	200
35	Mangrovejkt.id bersama Howden	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	100
36	Kertabumi	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	16
37	Mangrovejkt bersama Teladan Prima Argo	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	100
38	Kemangteer bersama UPN	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	50
39	Bumi Journey	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	30
40	Kemangteer bersama Social ACT	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	20
41	IKAMAT dan SMA Pangudi Luhur	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	100
42	STMA Trisakti	Elang Laut	Bakau Rhizopora Sp	2500

No.	INSTANSI /PIHAK YANG MENANAM	TEMPAT PELAKSANAAN	JENIS BIBIT MANGROVE	JUMLAH BIBIT
43	LEVA bersama Indorelawan	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	100
44	Bank Resona Perdania	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	3000
45	IALI bersama LIONCLUB	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	150
46	Mangrovejkt.id bersama Proki Duren Sawit	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	60
47	Mangrovejkt.id bersama FIF Group	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	200
48	Lindungi Hutan bersama KUFPEC	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	300
49	PT. PLN (Persero) UIP JBB	Ekowisata dan Elang Laut	Bakau Rhizopora Sp	2000
50	Teknik Lingkungan Presiden Universiti	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	15
51	Mangrovejkt.id bersama Kintetsu	Wkowisata	Bakau Rhizopora Sp	100
52	Mangrovejkt.id bersama CMB NIAGA	Elang Laut	Bakau Rhizopora Sp	100
53	Mangrovejkt.id bersama Pt. Sysmex	Elang Laut	Bakau Rhizopora Sp	100
54	STIKOM	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	18
55	Mangrovejkt.id bersama Whiz Hotel	Elang Laut	Bakau Rhizopora Sp	90
56	Lindungi Hutan bersama NEXIA	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	300
58	ECO TOUCH	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	25
59	Lindungi Hutan bersama BAF	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	3300
60	YAMAHA	Elang Laut	Bakau Rhizopora Sp	5000
61	ASIANAGRO	Elang laut	Bakau Rhizopora Sp	2500
62	BIDANG KEHUTANAN	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	500
63	Lindungi Hutan bersama SKK MIGAS	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	10000
64	AEON	Elang Laut	Bakau Rhizopora Sp	3000
65	BEM FMIPA UI	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	50
66	SMAN 29 Jakarta	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	100
67	Universitas Mercu Buana	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	80
68	Lindungi Hutan bersama PT. Orico Balimor Finance	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	300
69	Mangrovejkt.id bersama BASKET BALL	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	60
70	JASA RAHARJA	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	1000
71	PT.PANIN DAI-ICHI	Elang Laut	Bakau Rhizopora Sp	1000
72	SMA 61 JAKARTA	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	300
73	ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia)	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	500
74	PT. Asuransi BRI life	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	1000
75	KOWANI (Kongres Wanita Internasional)	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	100
76	BPOM Jakarta	Elang Laut	Bakau Rhizopora Sp	2000
77	BPOM Pusat	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	10860
78	Lindungi hutan bersama Logos	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	485
79	Mangrovejkt.id bersama Student SMA	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	60
80	IKSI (Ikatan Keluarga Sastra Indonesia) UI	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	30
81	Benih Baik.com bersama MASTERCART	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	50
82	SMPIT PLUIT RAYA JAKARTA	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	100
83	Mangrovejkt bersama DEUCTH BANK	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	300
84	Mangrove jkt bersama Sinarmas	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	100
85	Kertabumi bersama GETSBY	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	1000
86	PGI	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	300

No.	INSTANSI /PIHAK YANG MENANAM	TEMPAT PELAKSANAAN	JENIS BIBIT MANGROVE	JUMLAH BIBIT
87	Lindungi Hutan bersama MAP	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	900
88	DPD REI DKI JAKARTA	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	1000
89	Mangrovejkt bersama HIIP	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	50
90	Komunitas	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	50
91	MAPADIRA (Mahasiswa Pencinta Alam Dian Nusantara)	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	300
92	Bumi Journey bersama PT.Bang BTPN	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	15
93	Mangrovejkt.id bersama HIIP	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	55
94	Mangrovejkt.id bersama OCBC	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	200
95	Mangrovejkt bersama THIESS	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	100
96	Mangrovejkt bersama BPKH	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	300
97	Mangrovejkt bersama Yayasan Weshap	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	60
98	Pusri	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	1800
99	ASIANAGRO	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	5000
100	UNIVERSITAS BINA NUSANTARA	Ekowisata	Bakau Rhizopora Sp	130
	TOTAL			**73217**

SASARAN 2
"Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau"

Dalam rangka pencapaian Sasaran pertama yang juga merupakan IKU Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yaitu "Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau" dapat diukur dengan indikator kinerja yaitu "Persentase Wilayah Kelurahan dengan Infrastruktur Hijau-Biru Terintegrasi". Infrastruktur hijau-biru terintegrasi adalah penyediaan sumur resapan/bioswale/kolam retensi/rain garden/embung pada lahan ruang terbuka hijau yang dikelola oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Indikator kinerja ini dukur melalui perhitungan dengan rumus: jumlah kelurahan yang memiliki infrastruktur hijau-biru dibagi jumlah total kelurahan di 5 wilayah DKI Jakarta (262 kelurahan) dikali 100%. Pada tabel berikut, disajikan realisasi indikator persentase wilayah kelurahan dengan infrastruktur Hijau-Biru Terintegrasi.

Tabel 18 Capaian Indikator Persentase Wilayah kelurahan dengan Infrastruktur Hijau-Biru

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau	Persentase Wilayah Kelurahan dengan Infrastruktur Hijau-Biru Terintegrasi	27	27,8	103%

Pada tahun 2023, terdapat penambahan sebanyak 7 Kelurahan (total 73 Kelurahan) yang telah mengimplementasikan infrastruktur hijau-biru terintegrasi dengan realisasi sebesar 27,8 %, melampaui dari target yang ditetapkan (27%). Adapun lokasi penambahan 7 kelurahan tersebut disajikan pada tabel dibawah:

Tabel 19 Daftar Lokasi Pembangunan/Penataan Infrastruktur Hijau Biru Terintegrasi 2023

No	WILAYAH	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
1	Jakarta Pusat	Cempaka Putih	Cempaka Putih Timur	Kolam Retensi
2	Jakarta Selatan	Kebayoran Baru	Senayan	Rain Garden
3	Jakarta Selatan	Kebayoran Baru	Pulo	Rain Garden
4	Jakarta Timur	Cakung	Cakung Barat	Rain Garden
5	Jakarta Timur	Kramat Jati	Cililitan	Bioswale
6	Jakarta Timur	Makasar	Pinang Ranti	Bioswale
7	Jakarta Timur	Matraman	Pisangan Baru	Bioswale

Adapun untuk daftar kelurahan yang telah mengimplementasikan infrastruktur hijau-biru sampai dengan tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 20 Daftar Kelurahan dengan Infrastruktur Hijau- Biru

Terintegrasi Sampai dengan tahun 2023

No	WILAYAH	KECAMATAN	KELURAHAN	TOTAL		
				BIOSWALE	KOLAM RETENSI	RAIN GARDEN
1	Jakarta Pusat	Gambir	Gambir	1	0	0
2		Menteng	Pegangsaan	1	0	0
3		Sawah Besar	Gunung Sahari Utara	1	0	0
4		Senen	Bungur	1	0	0
5		Tanah Abang	Gelora	1	0	0
6		Tanah Abang	Kebon Kacang	1	0	0
7		Cempaka Putih	Cempaka Putih Timur	0	1	0
8	Jakarta Utara	Cilincing	Marunda	0	1	0
9		Cilincing	Rorotan	0	2	0
10		Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	0	0	1
11		Penjaringan	Pejagalan	0	1	0
12	Jakarta Timur	Cakung	Penggilingan	0	3	0
13		Cakung	Ujung Menteng	0	1	0
14		Cakung	Cakung Barat	0	0	1
15		Cipayung	Bambu Apus	1	6	0
16		Cipayung	Ceger	0	1	0
17		Cipayung	Cilangkap	0	4	0
18		Cipayung	Cipayung	0	2	0
19		Cipayung	Lubang Buaya	0	3	0
20		Cipayung	Munjul	0	2	0
21		Cipayung	Pondok Ranggon	0	2	0
22		Cipayung	Setu	0	4	0
23		Ciracas	Cibubur	0	5	0
24		Ciracas	Ciracas	0	3	0
25		Ciracas	Kelapa Dua Wetan	0	3	0
26		Duren Sawit	Malaka Sari	0	1	0
27		Kramat Jati	Dukuh	0	1	1
28		Kramat Jati	Cililitan	1	0	0
29		Makasar	Cipinang Melayu	0	2	0
30		Makasar	Makasar	0	1	0
31		Makasar	Pinang Ranti	1	0	0
32		Matraman	Pisangan Baru	1	0	0
33		Pulo Gadung	Jati	1	0	0
34		Pulo Gadung	Rawamangun	1	0	0
35	Jakarta Selatan	Jagakarsa	Ciganjur	0	4	0
36		Jagakarsa	Cipedak	0	8	0
37		Jagakarsa	Jagakarsa	2	3	0

No	WILAYAH	KECAMATAN	KELURAHAN	TOTAL		
				BIOSWALE	KOLAM RETENSI	RAIN GARDEN
38		Jagakarsa	Lenteng Agung	0	1	0
39		Jagakarsa	Srengseng Sawah	1	3	0
40		Jagakarsa	Tanjung Barat	0	1	0
41		Kebayoran Baru	Kramat Pela	0	1	0
42		Kebayoran Baru	Selong	1	0	0
43		Kebayoran Baru	Senayan	0	0	1
44		Kebayoran Baru	Pulo	0	0	1
45		Kebayoran Lama	Grogol Selatan	1	0	0
46		Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Utara	0	1	0
47		Pancoran	Duren Tiga	0	2	0
48		Pancoran	Rawajati	0	1	0
49		Pasar Minggu	Jati Padang	0	2	0
50		Pasar Minggu	Kebagusan	0	3	0
51		Pasar Minggu	Pejaten Barat	0	1	1
52		Pesanggrahan	Petukangan Utara	0	1	0
53		Tebet	Tebet Timur	1	2	1
54	Jakarta Barat	Cengkareng	Duri Kosambi	1	0	1
55		Cengkareng	Kapuk	1	0	0
56		Cengkareng	Rawa Buaya	2	0	1
57		Grogol Petamburan	Jelambar Baru	1	0	0
58		Grogol Petamburan	Tanjung Duren Selatan	1	0	0
59		Grogol Petamburan	Tomang	1	0	0
60		Grogol Petamburan	Wijaya Kusuma	1	0	0
61		Taman Sari	Mangga Besar	2	0	0
62	Jakarta Barat	Tambora	Angke	1	0	0
63		Kebon Jeruk	Duri Kepa	1	0	0
64		Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	1	0	0
65		Kalideres	Kalideres	2	0	0
66		Kalideres	Kamal	0	0	1
67		Kalideres	Pegadungan	1	0	1
68		Palmerah	Kemanggisan	1	1	0
69		Kembangan	Joglo	1	0	0
70		Kembangan	Kembangan Selatan	2	0	1
71		Kembangan	Kembangan Utara	0	1	0
72		Kembangan	Meruya Utara	0	0	1
73		Kembangan	Srengseng	0	2	0
TOTAL				38	87	13

Selain keempat indikator tujuan dan sasaran organisasi diatas, di dalam sasaran strategis juga terdapat 20 Rencana Aksi KSD (Kegiatan Strategis Daerah) yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Berikut adalah capaian untuk tiap Rencana Aksi KSD tersebut di tahun 2023:

Tabel 21 Capaian Rencana Aksi KSD 2023

No	Rencana Aksi	2023			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	Beautifikasi koridor jalan	-	-	100%	-
2	Dukungan Pemprov DKI Jakarta terkait Pengembangan TOD Stasiun Tanah Abang	-	-	100%	100%
3	Implementasi aksi mitigasi dan adaptasi bencana iklim	-	100%	-	100%
4	Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP Seluruh Perangkat Daerah	-	-	-	-
5	Pembangunan Jalan Strategis dan Missing Link	-	-	-	-
6	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan konsep integrasi hijau-biru	-	-	-	100%
7	Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Kawasan Waduk	-	-	100%	100%
8	Pengendalian Pencemaran Udara	100%	100%	100%	100%
9	Penguatan Kolaborasi dengan CSR/swasta dalam rangka penghijauan	-	-	-	100%
10	Penyediaan akses jalan dan trotoar beserta kelengkapannya dari Jalan DI Panjaitan menuju Stasiun KCJB di Halim sebagai pendukung TOD	-	100%	-	-
11	Penyediaan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	100%	100%	100%	100%
12	Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi penyandang disabilitas	-	-	100%	100%
13	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2023	-	100%	-	100%
14	Penyelesaian Trotoar Complete Street Di Kawasan Blok M	-	100%	100%	-
15	Penyelesaian Trotoar Complete Street Di Provinsi DKI Jakarta	-	-	100%	100%
16	Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja dan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%

No	Rencana Aksi	2023			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
17	Penyusunan Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	100%	-	-	-
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2023 dan 2024	100%	-	100%	-
19	Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJLP sesuai Kepgub 1195 Tahun 2022	-	-	100%	-
20	Perbaikan ruas jalan protokol dalam rangka mendukung KTT ASEAN 2023	-	100%	-	-

Sumber: https://ksd.jakarta.go.id/

Dari 20 rencana aksi KSD Tahun 2023 tersebut, keseluruhannya tercapai 100 % pada setiap triwulan di tahun 2023. Monitoring dan evaluasi capaian KSD ini dilakukan secara berkala (pertriwulan) dengan menggunakan sistem informasi pada tautan https://ksd.jakarta.go.id .

Faktor yang mendorong tercapainya target rencana aksi KSD ini, yaitu:

a) Bidang/Sudin/UPT melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan terutama kegiatan fisik di lapangan
b) Monitoring dan evaluasi secara berkala dan terukur yang dilakukan oleh Kepala Dinas kepada seluruh jajaran
c) Memberikan penugasan kepada PPTK dan Staf Teknis bersama dengan Pengawas lapangan untuk secara intensif memantau progres pembangunan fisik dan membuat proyeksi dan target harian serta dilaporkan setiap hari kepada PPK
d) Perencanaan X-1 pembangunaan/penataan konstruksi sebagai percepatan pelaksanaan kegiatan

Faktor penghambat tercapainya program dan kegiatan, antara lain:

a) Pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan terkendala pada komitmen dan kesiapan dari pihak penyedia.
b) Peralihan metode pengadaan pada konstruksi pembangunan taman menggunakan e-katalog, sehingga membutuhkan proses penyesuaian dengan mekanisme baru

3.2.2 CAPAIAN SASARAN KHUSUS

Sasaran khusus terdiri atas 13 indikator, yaitu:

1 Persentase penyelesaian penginputan data pengadaan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan pada sistem informasi Jakarta Satu sesuai standar, terealisasi 100%
2 Persentase Pemanfaatan E-Order, terealisasi 100%
3 Opini laporan Keuangan, terealisasi Wajar Tanpa Pengecualian (3) sesuai target.
4 Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program, terealisasi 100%
5 Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023, terealisasi 74,5 dari target 82

6 Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif, terealisasi 100%
7 Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, terealisasi 100%
8 Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD, terealisasi 100% dari target 100%.
9 Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri, terealisasi 91,85% dari target 80%
10 Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun, terealisasi 89,88% dari target 100%
11 Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan, terealisasi 100%.
12 Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko, terealisasi 100%.
13 Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi, terelisasi 95,54% dari target 71%

Dari 13 indikator pada sasaran khusus, 11 indikator tercapai sesuai/melampaui target sementara terdapat 2 indikator yang tidak tercapai, yaitu; Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun dan Predikat SAKIP Perangkat daerah Tahun 2023.

3.2.3 CAPAIAN SASARAN OPERASIONAL

Sasaran operasional terdiri atas 4 indikator, yaitu:

1 Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur, terealisasi 87,5 % dari target 100%.
2 Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat, terealisasi 93,1% dari target 100%
3 Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat, terealisasi 90,1 % dari target 88,5%
4 Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK), terealisasi 63,67% dari target 100%.

3.3 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

Berdasarkan alokasi anggaran, pagu awal DPA Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tahun 2023 adalah Rp. 1.399.044.283.215,- Namun pada bulan November berdasarkan DPA Perubahan tahun 2023, pagunya berubah menjadi Rp. 1.420.644.589.122,-. Untuk pagu dan realisasi dari setiap program, dapat dilihat pada tabel berikut:

Kode	Program	2023		
		Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase Realisasi (%)
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHAYATI)	988.312.698.390	952.107.067.944	96,337%

3.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	384.585.458.632	358.327.319.366	93,172%
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	45.785.002.568	43.383.470.472	94,755%
3.28.04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	284.042.719	258.518.892	91,014%
3.28.05	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.180.413.588	1.098.820.311	93,088%
3.28.06	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	496.973.225	471.274.750	94,829%
	Total	1.420.644.589.122	1.355.646.471.735	95,4%

Tabel 22 Realisasi Anggaran Tahun 2023 Per Program

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2023, capaian serapan anggaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota mencapai 95,4 %. Untuk serapan anggaran, secara umum mencapai serapan lebih dari 90 %. Adapun sisa anggaran yang tidak terserap merupakan bagian dari efisiensi anggaran tahun 2023, serta sisa pembayaran dari SPJ.

Jika dijabarkan penyerapan anggaran di tingkat SKPD/UKPD Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, maka Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki penyerapan anggaran tertinggi sebesar 97,37%, sementara Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memiliki penyerapan anggaran terendah yakni sebesar 93,67% saja. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel rekapitulasi penyerapan anggaran tingkat SKPD/UKPD di bawah ini:

Tabel 23 Realisasi Anggaran Tahun 2023 Per UKPD

NO	SPKPD/UKPD	ANGGARAN DPA PERUBAHAN (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	582.710.741.749	545.838.336.503	93,67
2	SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	100.471.353.308	97.388.083.212	96,93
3	SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	111.736.774.731	107.524.311.475	96,23
4	SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	174.979.131.190	167.388.160.365	95,66

NO	SPKPD/UKPD	ANGGARAN DPA PERUBAHAN (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
5	SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	153.857.181.745	149.635.409.495	97,26
6	SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	120.138.877.495	116.981.068.212	97,37
7	UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN	145.725.291.552	141.071.064.816	96,81
8	UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN	31.025.237.361	29.435.091.461	94,87
	Total	1.420.644.589.122	1.355.646.471.735	95,40%

Tabel di bawah berikut menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran level kegiatan dan program di tahun 2023. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Program Konservasi Sumberdaya Alam hayati dan Ekosistemnya menyumbang proporsi tingkat efisiensi penggunaan anggaran terbesar (8,99%). Sementara itu, Program Keanekaragaman Hayati memiliki proporsi tingkat efisiensi paling kecil yaitu sebesar 3,66%.

Tabel 24 Efisensi Penggunaan Anggaran 2023

Program	Pagu Anggaran	Realisasi		Efisiensi	
	(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHAYATI)	988.312.698.390	952.107.067.944	96,337 %	36.205.630.446	3,66%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	384.585.458.632	358.327.319.366	93,172 %	26.258.139.266	6,83%
Program Pengelolaan Hutan	45.785.002.568	43.383.470.472	94,755 %	2.401.532.096	5,25%
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	284.042.719	258.518.892	91,014 %	25.523.827	8,99%
Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.180.413.588	1.098.820.311	93,088 %	81.593.277	6,91%
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	496.973.225	471.274.750	94,829 %	25.698.475	5,17%
Total	1.420.644.589.122	1.355.646.471.735	95,4%	64.998.117.387	4,6%

3.4. ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA

Sebagai *highlight* capaian kinerja strategis, bahwa untuk sasaran strategis kinerja, dari 29 indikator yang diampu oleh Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tahun 2023, indikator yang tercapai sesuai target sebanyak 23 indikator, sementara yang tidak tercapai sebanyak 6 indikator. Jika dirinci lagi, untuk sasaran strategis yang terdiri atas indikator dari Renstra dan KSD (Kegiatan Strategis Daerah) tercapai keseluruhan sebanyak 12 indikator. Untuk sasaran khusus tercapai sesuai target sebanyak 10 indikator dan 3 indikator tidak tercapai Sementara sasaran operasional dari 4 indikator, untuk indikator survei kepuasan masyarakat tercapai 90,1 dari target 88,5, sementara untuk 3 indikator lainnya tidak tercapai.

Untuk faktor pendorong yang dapat mempercepat capaian target kinerja, yaitu:

a) Bidang/Sudin/UPT melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan terutama kegiatan fisik di lapangan
b) Monitoring dan evaluasi secara berkala dan terukur yang dilakukan oleh Kepala Dinas kepada seluruh jajaran
c) Memberikan penugasan kepada PPTK dan Staf Teknis bersama dengan Pengawas lapangan untuk secara intensif memantau progres pembangunan fisik dan membuat proyeksi dan target harian serta dilaporkan setiap hari kepada PPK
d) Kegiatan rutin seperti pembayaran gaji PJLP, gaji ASN, pembayaran BBM peralatan kerja, BBM KDO, dan lainnya dilaksanakan sesuai target dan diserap sesuai kebutuhan.
e) Perencanaan X-1 pembangunaan/penataan konstruksi sebagai percepatan pelaksanaan kegiatan

Adapun faktor yang menghambat pencapaian target kinerja, yaitu:

a) Peralihan metode pengadaan pada konstruksi pembangunan taman menggunakan e-katalog, sehingga membutuhkan proses penyesuaian dengan mekanisme baru
b) Pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan yang terkendala pada komitmen dan kesiapan dari pihak penyedia

3.5. INOVASI

Dinas Pertaman dan Hutan Kota sebagai SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki peran strategis dalam menjaga keindahan dan kenyamanan kota melalui penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang berkualitas selalu berkomitmen untuk menghasilkan inovasi dalam rangka mengakselerasi tercapainya kinerja organisasi. Untuk tahun 2023, terdapat 2 inovasi yang dihasilkan yaitu:

a) Pembangunan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau-Biru terintegrasi

   Provinsi DKI Jakarta merupakan Provinsi dengan daerah yang secara tata ruang sudah sedemikian detail dan rigid. Hal ini menjadikan upaya penambahan luasan RTH akan menghadapi *effort* yang besar dari aspek pemilihan lahan yang sesuai kriteria dan juga dari aspek biaya. Oleh karena itu diperlukan inovasi yang dapat memaksimalkan fungsi dari ruang terbuka yang saat ini sudah tersedia. Integrasi infrastruktur Hijau-Biru merupakan inovasi yang dihasilkan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota melalui pembanguna/penataan jejaring atau infrastruktur hijau-biru yang memberikan penekanan pada konfigurasi dan manajemen RTH sebagai suatu sistem yang terintegrasi dan fungsional. Jejaring/infrastruktur hijau-biru secara konseptual dikenal

sebagai koridor hijau-biru dengan tingkat biodiversitas tinggi, menyediakan jasa ekosistem seperti konservasi air, peningkat kualitas udara, koridor pergerakan udara, ruang untuk rekreasi dan berperan dalam mitigasi serta adaptasi iklim.

Bentuk faktual dari integrasi hijau biru adalah RTH Hijau berupa Taman, Jalur Hijau, Makam dan Hutan Kota yang didalamnya terintegrasi dengan infrastruktur biru berupa bioswale, rain garden dan kolam retensi. Sampai dengan tahun 2023 telah dilakukan pembangunan/penataan infrastruktur hijau biru terintegrasi pada 73 Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta.



Gambar 6 Bioswale di RTH Jalur Hijau

b) Program penanaman dalam rangka penghijauan yang dilakukan secara masiv

Program penanaman dalam rangka penghijauan merupakan *key factor* dalam pencapaian indikator kualitas lahan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Selain itu, penanaman juga berperan dalam pengurangan pencemaran udara dalam rangka mitigasi dan adaptasi bencana iklim melalui fungsi pepohonan yang mampu menyerap polutan udara. Oleh karena itu diperlukan terobosan untuk mengakselerasi program penanaman ini sehinngga didapatkan hasil penghijauan di Jakarta secara massive. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota menginisisasi dilaksanakannya program penanaman secara massive melibatkan berbagai stakeholder baik para SKPD Pemprov DKI maupun sektor privat. Untuk kegiatan internal Pemerintah Provinsi yang melibatkan SKPD lain, terdapat program Jumat menanam yang dilakukan secara reguler sepanjang tahun 2023. Kemudian untuk pelibatan sektor privat dalam penghijauan, sepanjang 2023 telah dilaksanakan dengan melibatkan sebanyak 97 kegiatan penghijauan dengan skema CSR.



Gambar 7 Penanaman 1000 pohon oleh Bapak Pj Gubernur DKI Jakarta dan Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

3.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

3.6.1. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan berbasiskan indikator kinerja utama di level Sasaran, karena level sasaran merupakan penjabaran dari level tujuan yang disusun dengan sistem cascading. Berikut uraian analisis efisiensi anggaran, disusun berdasarkan sasaran renstra:

a) Capaian IKU : Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau
Berikut capaian kinerja pada sasaran Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau	Persentase Wilayah Kelurahan dengan Infrastruktur Hijau-Biru Terintegrasi	27	27,8	103%

Pada tabel dibawah disajikan hasil perhitungan efisiensi penggunaan anggaran dengan berdasarkan capaian indikator kinerja Persentase Wilayah Kelurahan dengan Infrastruktur Hijau-Biru Terintegrasi yang memiliki satu program yaitu Program Keanekaragaman Hayati. Berdasarkan tabel tersebut, dengan capaian IKU sebesar 103 %, didapatkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 6,63%, dan perhitungan nilai efisiensi sebesar 66,57%. Efisiensi ini secara kalkulatif didapatkan dari capaian IKU yang melampaui target yang ditetapkan (103%) serta dari efisiensi sisa anggaran tidak terpakai (sisa SPJ)

Tabel 25 Perhitungan Nilai Efisiensi Indikator Persentase Wilayah Kelurahan dengan Infrastruktur Hijau-Biru Terintegrasi

Capaian IKU										100,00%
	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKU	Realisasi IKU	Realisasi IKU (%)	Capaian IKU	Capaian IKU	CP per UKE I/II	
1	Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau	Persentase Wilayah Kelurahan dengan Infrastruktur Hijau-Biru Terintegrasi	Persentase	27	27,8	102,96%	102,96%	102,96%	102,96%	

Efisiensi Output Program									6,63%
	Program	Output Program	Capaian IKU	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	Hasil Capaian IKU dengan Anggaran	(AA x IKU)-RA	Efisiensi	Realisasi anggaran
1	Terselenggaranya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	102,96%	988.312.698.390	952.107.067.944	1.017.596.037.601,56	65.488.969.658	6,63%	96,34
Nilai Efisiensi									66,57%

Capaian Sasaran IKU									100,00%
No.	iku	sasaran	Satuan	Target IKP	Realisasi IKP	Realisasi IKP (%)	CSP per SP	CSP per Program	CSP per UE I
1	Persentase Wilayah Kelurahan dengan Infrastruktur Hijau-Biru Terintegrasi	Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau	Persentase	27	27,8	102,96%	102,96%	102,96%	102,96%

b) Capaian IKU : Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau

Berikut capaian kinerja pada sasaran Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan	Persentase Penambahan Luas dan Kualitas Lahan Ruang Terbuka Hijau Hutan	75,58	76,39	101,1%

Pada tabel dibawah disajikan hasil perhitungan efisiensi penggunaan anggaran dengan berdasarkan capaian indikator kinerja Persentase Penambahan Luas dan Kualitas Lahan RTH Hutan yang terdiri dari 5 (lima) program yaitu Program Pengelolaan Hutan, Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Berdasarkan tabel tersebut, dengan capaian IKU sebesar 101,1 %, didapatkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 7,73%, dan perhitungan nilai efisiensi sebesar 69,33%. Efisiensi ini secara kalkulatif didapatkan dari capaian IKU yang melampaui target yang ditetapkan (101,1) serta dari efisiensi sisa anggaran tidak terpakai (sisa SPJ)

Tabel 26 Perhitungan Nilai Efisiensi Indikator Persentase penambahan Luas dan Kualitas Lahan RTH Hutan

Efisiensi Output Program									7,73%
	Program	Output Program	Capaian IKU	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	Hasil Capaian IKU dengan Anggaran	(AA x IKU)-RA	Efisiensi	Realisasi anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan	101,07%	384.585.458.632	358.327.319.366	388.707.107.501	30.379.788.135	7,73%	94,34%
2	Program Pengelolaan Hutan	Persentase luas hutan yang dikelola	101,07%	45.785.002.568	43.383.470.472	46.275.685.977	2.892.215.505		
3	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Persentase penyelesaian laporan masyarakat terkait konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya	101,07%	284.042.719	258.518.892	287.086.839	28.567.947		
4	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase peserta dengan tingkat pemahaman baik pada pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan bidang kehutanan	101,07%	1.180.413.588	1.098.820.311	1.193.064.223	94.243.912		
5	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Jumlah DAS di Provinsi DKI Jakarta yang telah dikelola sesuai standar	101,07%	496.973.225	471.274.750	502.299.347	31.024.597		
				432.331.890.732	403.539.403.791	436.965.243.888	33.425.840.097		
Nilai Efisiensi									69,33%
Capaian Sasaran IKU									100,00%

No.	iku	sasaran	satuan	Target IKP	Realisasi IKP	Realisasi IKP (%)	CSP per SIKU	CSP per Program	CSP per UE I
1	Persentase penambahan luas dan kualitas lahan ruang terbuka hijau hutan	Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan	Persentase	75,58	76,39	101,07%	101,07%	101,07%	101,07%

3.6.2 ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu aset dan modal terpenting dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dari suatu organisasi publik. SDM menjadi kunci bagaimana kinerja organisasi yang dihasilkan merupakan agregasi dari capaian kinerja individu. Oleh karena itu Dinas Pertamanan dan Hutan Kota selalu berupaya menjaga dan meningkatkan kompetensi SDM.

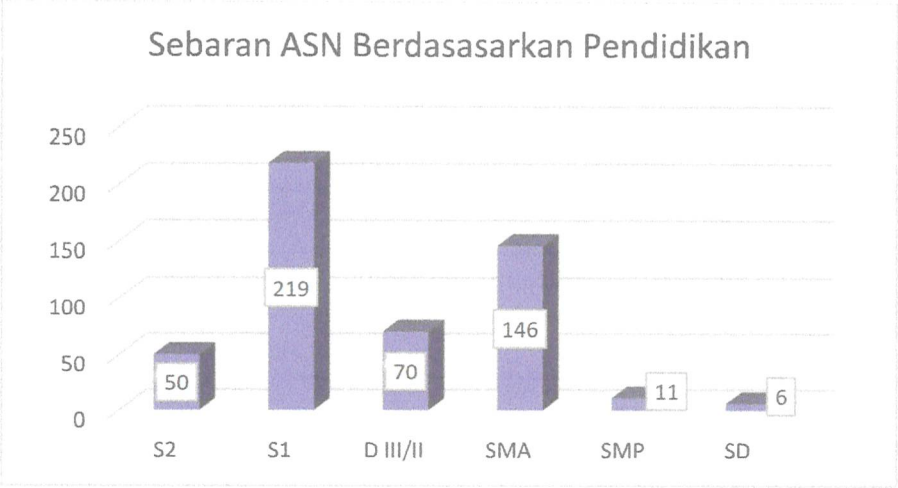
SDM yang ada di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, terbagi atas pegawai ASN dan non ASN. Pada tahun 2023, jumlah pegawai keseluruhan baik ASN dan non ASN adalah sebanyak 10.303 orang. Rincian data pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 27 Data Sumber Daya Manusia Tahun 2023

No	UKPD	PNS	CPNS	PPPK	PJLP	Jumlah
1	Sekertariat Dinas	29		2	94	**125**
2	Bidang Pertamanan	25			1.030	**1.055**
3	Bidang Jalur Hijau	24			988	**1.012**
4	Bidang Kehutanan	27			175	**202**
5	Bidang Pemakaman	13			48	**61**
6	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat	40			953	**993**
7	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara	31			1.272	**1.303**
8	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Barat	39			1.031	**1.070**
9	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan	51			1.700	**1.751**
10	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Timur	49			1.610	**1.659**
11	Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan	16			300	**316**
12	Unit Pengadaan Tanah Pertamanan dan Hutan Kota	9				**9**
13	Pusat Data dan Informasi Pertamanan dan Hutan Kota	9			10	**19**
14	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	137		1	590	**728**
	Jumlah	499	0	3	9801	**10.303**

Untuk melihat pemetaan SDM Dinas Pertamanan dan Hutan Kota berdasarkan kompetensi dan kualifikasinya, diperlukan sajian data berdasarkan pendidikan dan

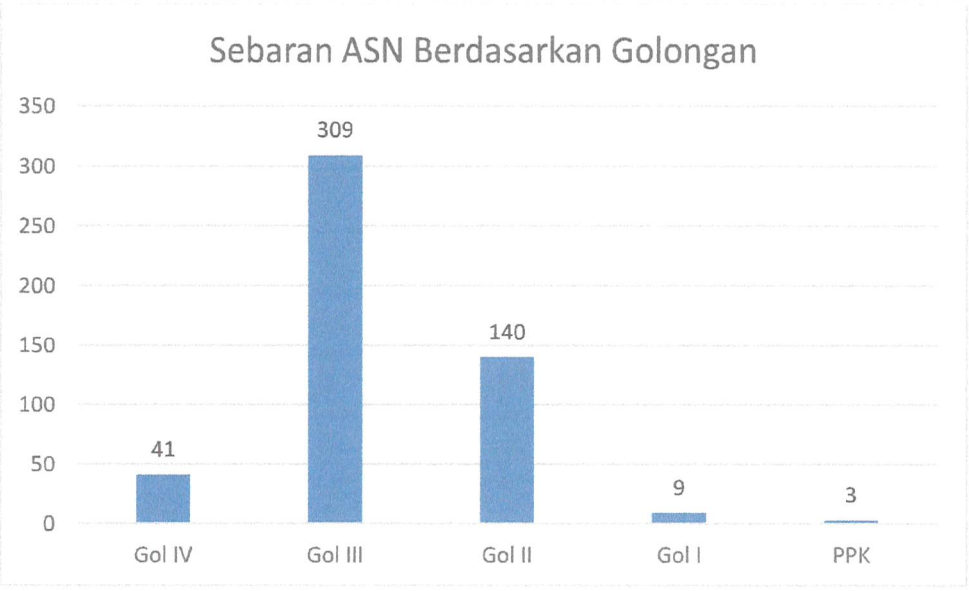
golongan. Grafik berikut menyajikan komposisi perbandingan ASN di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tahun 2023 berdasarkan tingkat pendidikan:



Gambar 8 Sebaran ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan latar belakang pendidikan, SDM Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memiliki latar belakang pendidikan bervariasi dari tingkat SD sampai Pasca Sarjana (S2). Sebaran tertinggi yaitu SDM dengan pendidikan Sarjana (219), berikutnya pendidikan SMA (146) dan pasca sarjana (50). Pendidikan SMP dan SD dengan jumlah paling sedikit yaitu 11 dan 6, secara berurutan.

Secara khusus untuk ASN, pemetaan juga bisa disajikan berdasarkan pangkat golongan. Pada grafik dibawah disajikan pemetaan SDM ASN berdasarkan golongan. Untuk golongan III memiliki jumlah terbanyak (309) disusul golongan IV (41) dan golongan II. P3K sebanyak 3 orang merupakan klasifikasi golongan tersendiri yang berbeda dengan PNS.



Gambar 9 sebaran ASN Berdasarkan Golongan

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2023 menggambarkan sejauh mana pencapaian kinerja seluruh Unit dan Bidang yang ada di dalam Organisasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Pencapaian kinerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota pada Tahun 2023 secara garis besar diukur dengan 3 (tiga) kelompok sasaran yaitu Sasaran Strategis, Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional yang merupakan satu kesatuan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

Dalam kelompok sasaran strategis yang terdiri atas indikator tujuan dan sasaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, terdapat 4 indikator kinerja, dan keempat indikator tersebut tercapai/melampaui target yang ditetapkan. Untuk sasaran khusus yang berjumlah 13 indikator, 11 indikator, sementara 2 indikator tidak tercapai. Sementara untuk sasaran operasional, 3 indikator tidak tercapai sementara satu indikator tercapai. Sehingga dari total 29 indikator kinerja yang diperjanjikan, 24 indikator yang tercapai dan 5 indikator tidak tercapai. Selain itu juga terdapat 20 rencana aksi Kegiatan Strategis Daerah (KSD), dan keseluruhan rencana aksi KSD tersebut tercapai 100%.

Sejalan dengan capaian Kinerja, kinerja keuangan pada tahun 2023 menunjukkan capaian serapan anggaran sebesar 95,4 %. Untuk serapan anggaran, secara umum mencapai serapan lebih dari 90 %. Adapun sisa anggaran yang tidak terserap merupakan bagian dari efisiensi anggaran tahun 2023, serta sisa pembayaran dari SPJ.

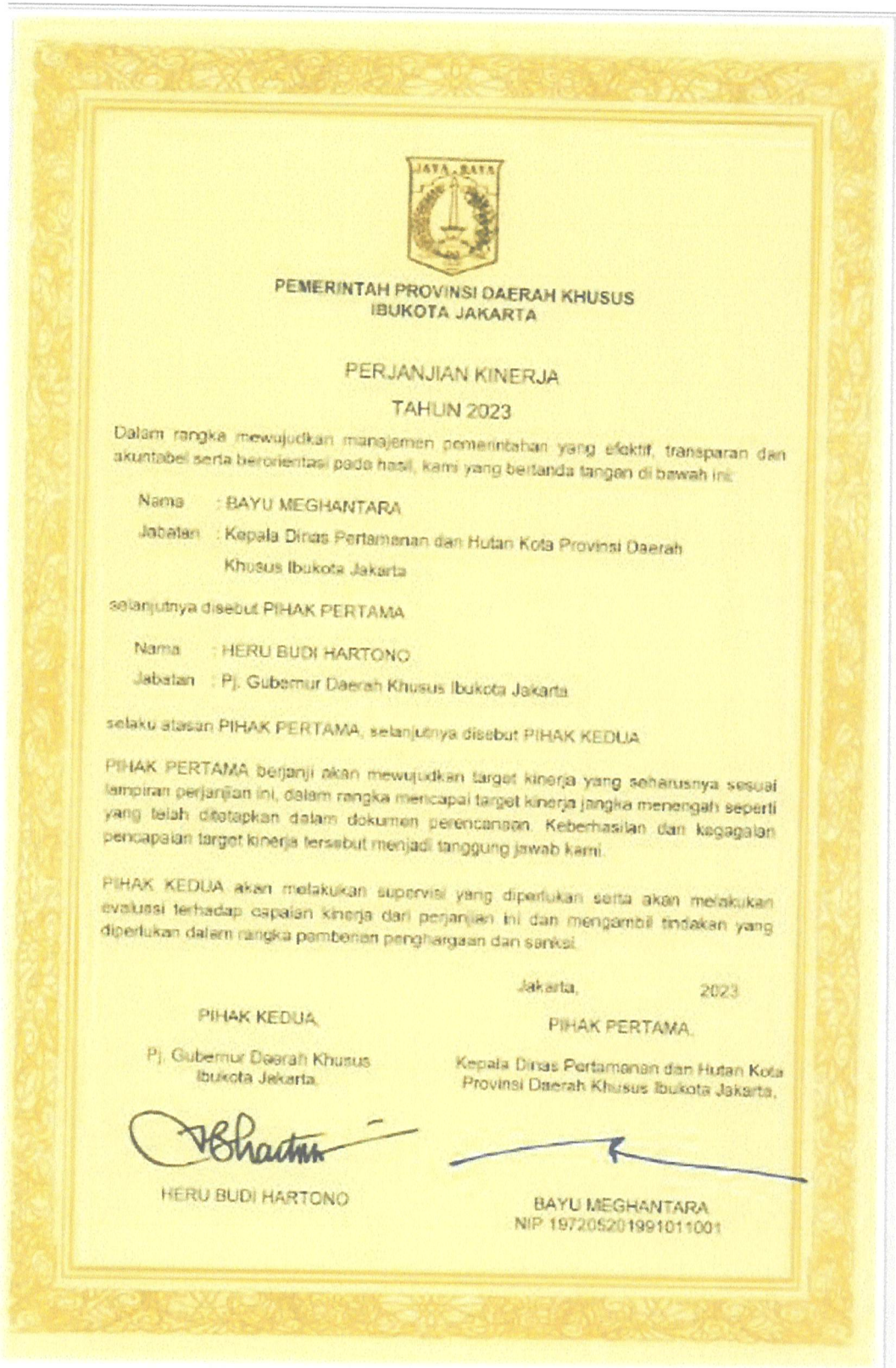
4.2 SARAN

Dengan hasil pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran yang kurang maksimal di tahun 2023, tentunya perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan agar kinerja di tahun mendatang bisa lebih baik lagi, yaitu diantaranya:

1. Untuk peningkatan prosentase luasan RTH dilakukan langkah pengoptimalan perolehan lahan RTH melalui serah terima fasos fasum dari BPAD karena keterbatasan penyediaan anggaran untuk pengadaan lahan melalui APBD.
2. Untuk peningkatan pencapaian IKL, perlu menggalakkan program penanaman pohon serta mengoptimalkan pemeliharaan RTH dalam rangka peningkatan luas vegetasi hutan dan non hutan (area tutupan lahan) di DKI Jakarta
3. Memetakan target kinerja dari level Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sampai level pelaksana sehingga setiap individu memiliki tanggung jawab dalam mencapai target kinerja organisasi
4. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berjenjang dan berkala agar target kinerja organisasi bisa tercapai
5. Implementasi dialog kinerja pegawai, untuk evaluasi kinerja individu serta sinkronisasi evaluasi kinerja organisasi

LAMPIRAN

A. PERJANJIAN KINERJA



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAYU MEGHANTARA

Jabatan : Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HERU BUDI HARTONO

Jabatan : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2023

PIHAK KEDUA,

Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

HERU BUDI HARTONO

PIHAK PERTAMA,

Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

BAYU MEGHANTARA
NIP 197205201991011001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Nama : Dinjo Meghantara
NIP : 197205201991011001
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
SASARAN STRATEGIS											
1	Penyediaan Ruang Terbuka dan Infrastruktur Hijau yang inklusif dan Berkualitas	1	Persentase Ruang Terbuka Hijau	e-SAKIP	DASAR HUKUM : 1. UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang 2. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau DEFINISI: Ruang Terbuka Hijau adalah ruang terbuka hijau Taman, Makam, Jalur Hijau dan Hutan. Ditargetkan dilakukan penambahan RTH setiap tahunnya seluas 6 Ha (0,009%) dari hasil pengalihan lahan dan serah terima fasos fasum. METODE PENGUKURAN : Luas total ruang terbuka hijau di lahan (n) dibagi luas daratan DKI Jakarta dikali 100%. Luas daratan DKI Jakarta 66.150 ha atau 661,5 km2 SUMBER DATA : Pengukuran Mandiri	5.170	5.175	5.176	5.185	5.185	Persen
2	Peningkatan Tutupan Lahan Melalui Perluasan Ruang Terbuka Hijau Kota	1	Indeks Kualitas Lahan	e-SAKIP	DASAR HUKUM : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup DEFINISI : Indeks Kualitas Lahan adalah Nilai yang menggambarkan kualitas lahan dalam suatu wilayah pada waktu tertentu berdasarkan luas tutupan lahan. METODE PENGUKURAN : IKL = 100-[(84,3-(TL x 100)) x 50 : 84,3] SUMBER DATA : Pengukuran Mandiri	N/A	N/A	N/A	26,75	26,75	Nilai

3	Peningkatan Kualitas Seberan Ruang Terbuka Hijau	1	Persentase wilayah kelurahan dengan infrastructur hijau - biru terintegrasi	e-SAKIP	DASAR HUKUM : 1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau 2. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau DEFINISI : Infrastruktur hijau-biru terintegrasi adalah penyediaan sumur resapan/bioswale/kolam retensi/rain garden/embung pada lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. METODE PENGUKURAN : Jumlah kelurahan yang memiliki infrastruktur hijau-biru dibagi jumlah total kelurahan di 5 wilayah DKI Jakarta (282 kelurahan) dikali 100%. SUMBER DATA : Pengukuran Mandiri	25	25	25	27	27	Persen
4	Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan	1	Persentase penambahan luas dan kualitas lahan ruang terbuka hijau hutan	e-SAKIP	DASAR HUKUM : 1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau 2. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau DEFINISI: Persentase luas hutan dibawah pengelolaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang telah dilakukan pembangunan/penataan/penghijauan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas hutan. Adapun keseluruhan luas lahan hutan yang dikelola oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota adalah 299,72 Ha. METODE PENGUKURAN : Luas pembangunan/penataan/penghijauan hutan dibagi Luas hutan yang dikelola Dinas Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dikali 100% SUMBER DATA : Pengukuran Mandiri	73.91	73.91	73.91	75.58	75.58	Persentase
5	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	N/A	100	100	100	100	Persen
6	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	N/A	N/A	100	100	100	Persen

7	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	N/A	N/A	100	N/A	100	Persen
8	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Banjir dan Rob Sub KSD Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir	N/A	N/A	100	100	100	Persen
9	Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Perbaikan kualitas lingkungan hidup Sub KSD Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Perbaikan kualitas lingkungan hidup Sub KSD Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim	100	100	100	100	100	Persen
10	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	100	100	100	100	Persen
11	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Pengembangan Transit Oriented Development (TOD)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Pengembangan Transit Oriented Development (TOD)	N/A	N/A	100	100	100	Persen
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapnya	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapnya	N/A	100	100	100	100	Persen

SASARAN KHUSUS											
12	Terselenggaranya pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu	1	Persentase penyelesaian pengimputan data pengadaan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan pada sistem informasi Jakarta Satu sesuai standar	e-Kinerja	Jumlah data pengadaan dan inventarisasi tanah berbasis APBD periode 2017-2022 dibagi jumlah target pendataan tanah dikali 100% **Target** **DPRKP : 52 Bidang Tanah** **DSDA : 1282 Bidang Tanah** **DBM : 703 Bidang Tanah** **Distamhut : 565 Bidang Tanah**	N/A	15%	30%	100%	100%	Persentase
13	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	**Formula Pengukuran :** Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk gaban, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
14	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	**Definisi :** Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI menyatakan tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK **Formula Pengukuran :** WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat
15	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik, program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam. d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang. Penghitungan: a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (matriks editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
16	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dari hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 82)	N/A	N/A	N/A	A (82)	A (82)	Predikat

17	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	1	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	e-Kinerja	Definisi : Tersedianya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK). Pengelolaan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon II. Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Seluruh Eselon III Setara Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. Unit Pengolah : Biro/Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh UPT) Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. Unit Kearsipan (UK) Tingkat II sebagai berikut : Inspektorat,Badan,Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja,Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat,Biro Umum Dasar Hukum: 1. Permenpan-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. 2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan 3. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Pengukuran Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK) II di bagi jumlah unit Pengolah (UP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kali 100% - Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusanya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. - Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke Asisten Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. - Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusan. Waktu Penilaian: TW I : N/A TW II : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Januari s.d. Juni TW III : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Juli s.d Desember. TW IV : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 Periode Januari s.d Desember.	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase

18	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Kepurusan Gubernur	e-Kinerja	**Definisi :** Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah **Dasar Hukum :** Keputusan Gubernur Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Prioritas Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 **Formula Pengukuran :** [(Jumlah data terkumpul ke walidata) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut)] x 100% Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis **Sumber Data :** Daftar Data Daerah (Portal Data)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
19	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	e-Kinerja	**Definisi :** Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada PD/UKPD yang mempunyai BMD berupa Gedung dan Bangunan Kepala Perangkat Daerah melaporkan Hasil Inventarisasi BMD pada PD dan UKPD yang berada dalam Organisasi Perangkat Daerah masing-masing kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BPAD selaku Sekretaris Tim Pengendali. BMD yang sebagai diinventarisasi adalah : 1. BMD tidak ada berupa non fisik. 2. BMD tidak ada berupa fisik. 3. BMD ada, bagian dari aset induk. 4. BMD ada, sudah melengkapi data dan informasi, menempelkan label dan scan QR Code. **Penghitungan:** 1. Persiapan 10% a. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun SK Tim /Surat Tugas Tim Inventarisasi b. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun Jadwal Inventarisasi 2. Pelaksanaan 75% a. Bobot 75%: PD/UKPD menyelesaikan Pelaksanaan Inventarisasi 3. Pelaporan 15% a. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) b. Bobot 5%: PD/UKPD membuat Berita Acara Hasil Inventarisasi (BAHI) c. Bobot 5%: PD/UKPD membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)	N/A	10%	55%	100%	100%	Persentase

20	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	**Definisi :** 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia diunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare) 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. **Formula Pengukuran :** Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali lahan) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, ditambahkan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali lahan). **Sumber Data :** 1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) PSDN Kementerian Dalam Negeri 2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD **Dasar Hukum :** 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri 2. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	N/A	N/A	N/A	80%	80%	Persentase
21	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	e-Kinerja	**DASAR HUKUN :** 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. **DEFINISI :** Terselesaikannya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui SimdikBat BPSDM Jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. **Formula Pengukuran :** [(Jumlah data yang terkumpul ke validasi SimdikBat) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4)] x 100% Sumber Data : SimdikBat BPSDM	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase

22	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	**DASAR HUKUM :** 1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan **DEFINISI :** Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://dm-bpsdm.jakarta.go.id **METODE PENGUKURAN :** Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4). **SUMBER DATA :** https://dm-bpsdm.jakarta.go.id	N/A	N/A	10%	50%	100%	Persentase
23	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	**Dasar Hukum:** 1. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2. Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta **Definisi Operasional:** Penerapan Manajemen Risiko direalisasikan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Pengaduan (SI-Pintar). 1. Struktur Manajemen Risiko Tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risiko (UPR) yang terdiri dari: a) Pemilik Risiko; b) Koordinator Risiko; dan c) Manajer Risiko. 2. Unit Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik RisikoKepala Perangkat Daerah (Level Eselon 3/Koordinator) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah 3. Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan.	N/A	40%	80%	100%	100%	Persentase

					a) Komunikasi dan konsultasi; b) Penetapan konteks; c) Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d) Penanganan Risiko; dan e) Pemantauan. Masing-masing Tahapan dituangkan dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta Risiko, dan Formulir penanganan Risiko. Formula Pengukuran : [(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Triwulan 4)] x 100% Output Sasaran : 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan Unit Kepatuhan Internal; 3. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 4. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko; 5. Dokumen Formulir penanganan Risiko. Metode Pengukuran : Tersedianya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan II : 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan Unit Kepatuhan Internal; Triwulan III : 1. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 2. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko Triwulan IV : 1. Dokumen Formulir penanganan Risiko Sumber Data: Hasil Verifikasi Inspektorat						

24	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi	e-Kinerja	**Dasar Hukum :** Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 186 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat dantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah." **Definisi Operasional :** Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan **Sumber Data :** e- SAKIP 2. Penyerapan Anggaran - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. **Sumber Data :** Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id	N/A	N/A	N/A	71%	71%	Persen
SASARAN OPERASIONAL											
25	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
26	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
27	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	Survei Kepuasan Masyarakat	Jaksurvei	Nilai diperoleh dari sistem Jaksurvei	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50	Indeks
28	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% **(Verifikasi oleh Inspektorat)**	25%	25%	25%	25%	100%	Persentase

Plt. Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,

Heru Budi Hartono

Jakarta, 2023
Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Provinsi DKI Jakarta,

Bayu Meghantara
NIP 197205201991011001

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1249 Tahun 2021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA RAMAH KELOMPOK RENTAN TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan hasil pemantauan dan evaluasi penyediaan sarana dan prasarana ramah kelompok rentan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Hasil pemantauan dan evaluasi penyediaan sarana dan prasarana ramah kelompok rentan di dapat dari akumulasi aspek pemenuhan, aspek kualitas dan aspek pendukung yang kemudian dikonversi dalam bentuk kategori penilaian.

KETIGA : Kategori penilaian sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini

KEEMPAT : Tata urutan hasil pemantauan dan evaluasi penyediaan sarana dan prasarana ramah kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak menggambarkan peringkat.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 30 November 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ABDULLAH AZWAR ANAS

NO.	PROVINSI	UNIT PELAYANAN PUBLIK	KATEGORI
10.	Provinsi Riau	Badan Pendapatan Daerah/ UPT SAMSAT Pekanbaru Kota	Baik
11.	Provinsi Kepulauan Riau	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sangat Baik
12.	Provinsi Kepulauan Riau	UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang	Baik
13.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cukup
14.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baik
15.	Provinsi Bengkulu	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Baik
16.	Provinsi Bengkulu	Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus	Cukup
17.	Provinsi Jambi	Perpustakaan Daerah	Sangat Baik
18.	Provinsi Jambi	Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher	Baik
19.	Provinsi Lampung	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Cukup
20.	Provinsi Lampung	Rumah Sakit Umum Daerah DR. H. Abdul Moeloek	Sangat Baik
21.	Provinsi Banten	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sangat Baik
22.	Provinsi Banten	Rumah Sakit Umum Daerah Banten	Cukup
23.	Provinsi DKI Jakarta	Unit Pengelola Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra HB Jassin	UPP TERBAIK
24.	Provinsi DKI Jakarta	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	Sangat Baik
25.	Provinsi Jawa Barat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sangat Baik
26.	Provinsi Jawa Barat	Museum Sri Baduga – UPTD Pengelolaan Kebudayaan	Cukup
27.	Provinsi Jawa Tengah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sangat Baik
28.	Provinsi Jawa Tengah	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo	Sangat Baik
29.	Provinsi DI Yogyakarta	Balai Layanan Perpustakaan	Sangat Baik
		Kantor Pelayanan Pajak	